



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RAPAT KERJA KOMISI VI DPRRI DENGAN MENTERI BUMNRI DAN
MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPMRI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I (satu)
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 22 September 2021
Waktu : 10.15 s.d. 13.51 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara I Lt.1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPRRI
Acara : Pembahasan mengenai:
1. Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2022 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran;
2. PMN Tahun 2022 dan Usulan Tambahan PMN Tahun 2021 (Kementerian BUMN);
3. Kesiapan Kementerian Investasi/BKPMRI dalam rangka menjalankan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Update Investasi Dalam Negeri.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
- Hadir : A. Anggota DPRRI:
47 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
12 dari 12 orang Anggota
1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulistio
3. Muhammad Prakosa
4. Darmadi Duriyanto
5. Rieke Diah Pitaloka
6. S.T Ananta Wahana, S.H.
7. Sonny T. Danaparamita
8. I Nyoman Parta, S.H.
9. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
11. Sondang Tiar Debora Tampubolon
12. dr. H. Mufti A. Anam
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

7 dari 8 orang Anggota

1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
2. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
3. H. Singgih Januratmoko, S.K.H, M.M.
4. Doni Akbar, S.E.
5. Trifena M. Tinal, B.Sc.
6. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
7. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)

6 dari 7 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A
2. Andre Rosiade
3. Khilmi
4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
5. M. Husein Fadlulloh, S.Bus., M.M. M.B.A.
6. M. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

4 dari 5 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. H. Subardi, S.H., M.H.
3. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
4. Muhammad Rapsel Ali

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. Faizol Riza, S.S.
2. Ir. H. M. Nasim Khan
3. Tommy Kurniawan
4. Marwan Ja'far
5. Drs. Muhammad Toha, S.Sos., M.Si.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

2 dari 5 orang Anggota

1. Muhammad Dhevy Bijak
2. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)

4 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK., M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina
3. Rafli
4. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
5 dari 5 orang Anggota
 1. H. Jon Erizal, S.E., M.B.A.
 2. Abdul Hakim Bafagih
 3. Eko Hendro Purnomo, M.Si.
 4. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.
 5. Hj. Intan Fauzi, S.H., LLM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
 2. Elly Rachmat Yasin

JALANNYA RAPAT,

KETUA RAPAT (ARIA BIMA / F-PDIP):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastiastu.**

Yang terhormat Pimpinan Komisi VI.

Yang terhormat kawan-kawan anggota Komisi VI yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Saudara Menteri BUMN Bapak Erick Thohir.

Selamat datang kami ucapkan yang terhormat Saudara Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia beserta jajarannya.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga rapat kerja pada pagi hari ini bisa kita laksanakan dalam keadaan sehat walafiat.

Dalam rangka masih situasi pandemi Covid-19 kali ini rapat-rapat masih kita laksanakan dengan ketentuan-ketentuan protokol Covid-19 yang mana kehadiran fisik tetap kita jaga seminimal mungkin perwakilan-perwakilan dari poksi yang tentunya semua terkait dengan ketentuan Surat Ketua DPRRI Nomor PW/107/DPRRI/IX/2020 11 September 2020. Juga terkait dengan kehadiran fisik ada surat baru tentang tatanan normal baru yang mana kita tetap akan melaksanakan rapat-rapat dengan mitra kerja yang diatur semuanya berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang mana administrasinya tidak menggunakan hanya tanda tangan secara formal, tapi juga tercatat dalam list partisipasi dalam aplikasi *Zoom*.

Pada saat rapat berlangsung diharapkan anggota dapat menjaga ketenangannya dan diharapkan Pimpinan akan mengatur mekanisme atau sistem rapatnya akan menggunakan atau menghidupkan *microphone mute* bagi yang hadir cara virtual. Rapat fisik dan virtual dilaksanakan sekali lagi kawan-kawan mohon tertib, maksimal hanya 2 jam dan kalau toh bisa diperpanjang dengan 30 menit dan kita berharap pedalaman-pedalaman bisa dilakukan seefektif mungkin dengan melalui juru bicara masing-masing fraksi dan apabila dimungkinkan atau apabila masih ada waktu kita akan putar kembali.

Menurut laporan Sekretariat Komisi VI DPRRI hari ini rapat telah dihadiri 20 Anggota yang hadir dari 50, 20 anggota yang hadir dari Komisi VI yang terdiri dari 9 fraksi, 2 anggota izin, dengan demikian kuorum telah terpenuhi sebagaimana Pasal 251 Ayat(1) Peraturan DPRRI tentang Tata Tertib. Oleh karena itu dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* izinkan saya membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)

Rapat hari ini terbuka untuk umum dan beberapa hari ini rapat-rapat kita di DPR juga dihadiri kawan-kawan adik-adik kita mahasiswa yang ada yang magang, ada yang juga kunjungan-kunjungan studi banding ke ke DPR. Kami persilakan berdiri adik-adik. Nanti kalau mau foto-foto sama Pak Menteri kamu turun mau selesai ya, Pak Menteri Erick Thohir ini sulit kamu kalau mau foto di luar, apalagi Pak Menteri Investasi kang Bahlil.

Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada Saudara Menteri BUMN dan Saudara Menteri Investasi Kepala BKPM atas kehadiran waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini. Sesuai undangan yang kami sampaikan agenda Rapat Kerja hari ini adalah sebagai berikut:

1. Menteri BUMN menyesuaikan RKAKL Tahun Anggaran 2022, kemudian Penyertaan Modal Negara Tahun 2022 dan usulan tambahan PMN 2021.
2. Menteri Investasi dan Kepala BKPM terkait dengan penyesuaian RKAKL Tahun Anggaran 2022 dan kesiapan Kementerian Investasi BKPM dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 dan *update* investasi dalam negeri.

Bapak, ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Sesuai dengan Surat Ketua Badan Anggaran nomor AG/12436/DPR-RI/IX/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN 2022 disampaikan hasil pembahasan RKAKL dengan rincian sebagai berikut:

Alokasi anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2022.

1. Kementerian Investasi BKPM. Kementerian investasi BKPM saya ragu besarnya kok tidak sampai T tapi kalau T kok Rp711,5 miliar, APBN kesepakatan juga Rp711,5 miliar;

2. Kementerian BUMN Rp208,2 miliar, APBN kesepakatan Rp208,2 miliar.

Jadi, teman-teman tidak usah ribut terlalu dalam-dalam dalam mendalaminya ya. Selanjutnya, kami persilakan kepada Saudara Menteri BUMN untuk menyampaikan penjelasannya sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan dan nanti dilanjutkan oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Waktu dan tempat kami persilakan.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Salam sejahtera,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebaikan,**

Terima kasih Pimpinan Rapat Komisi VI dan juga para anggota perwakilan rakyat dari Komisi VI yang hadir hari ini.

Tentu seperti yang sudah diinformasikan oleh Pimpinan bahwa anggaran untuk 2022 ini *dua ratus delapan koma dua* di mana terdiri 63% itu nanti belanja barang *seratus tiga puluh satu*, dan belanja modal itu Rp1 miliar, dan belanja pegawai Rp75 miliar dan alhamdulillah barusan Pak Menteri Investasi bisik-bisik mau nyumbang *lima puluh* katanya. Tentu Pimpinan yang terhormat dan para Anggota Dewan, untuk PMN 2021 terima kasih atas dukungannya dan memang sudah dirapatkan dengan Kementerian Keuangan dan tentu dari Pimpinan DPR dari komisi lain juga.

Untuk IFG ini putus Rp20 triliun ini bagian dari restrukturisasi daripada Jiwasraya yang *alhamdulillah* sudah mencapai 97%. Jadi, In Syaa Allah nanti para nasabah yang selama ini terkatung-katung bisa diselesaikan dan ini merupakan *legacy* daripada tentunya Komisi VI juga yang mendukung bagaimana prihatin daripada para nasabah yang terbengkalai selama belasan tahun.

Lalu untuk HK sendiri ini merupakan penugasan yaitu Rp6 triliun lebih bagaimana kita sesuai dengan diskusi-diskusi kita ingin memastikan keseimbangan daripada sosial dan ekonomi antara Jawa dan Sumatera karena itu tol daripada Sumatera ini terus dilaksanakan dan HK mendapat dukungannya.

Untuk Pelindo sendiri ini *satu koma dua* seperti yang pernah waktu itu dihadiri oleh seluruh Komisi VI di Bali dan beberapa menteri juga yang hadir. Memang ini *satu koma dua* ini dibutuhkan sebenarnya bukan untuk pembangunan daripada ada Pelindo-nya sendiri atau *port*-nya, tetapi lebih kepada bagaimana kebetulan di situ memang pendalaman daripada kedalaman lautnya harus dilakukan dan ada banyak karang sehingga memang nanti kapal-kapal pesiar bisa merapat ke Bali secara langsung.

Lalu untuk ITDC ini penugasan juga, ini untuk persiapan daripada ini ada koreksi ini ditulis masih G20 tetapi G20 sendiri kan sudah dipindahkan ke Bali, tetapi ini untuk 2023 ASEAN Summit yang tetap di Labuan Bajo. Jadi, nanti mohon maaf ini nanti dikoreksi oleh tim saya.

Lalu untuk KIB sendiri ini Kawasan Industri Batang. Jadi *alhamdulillah* kerjasama yang baik oleh kami dan Kementerian Investasi sekarang banyak sekali investasi yang masuk di Batang yaitu bagian juga yang penting dari mana kita memastikan juga industri baterai kita sekarang tidak menjadi *market* tetapi bangun di Indonesia yang salah satunya kemarin juga Hyundai sudah meresmikan pabriknya juga di Cikarang, tetapi kalau baterainya nanti di Batang dan sudah ada rapat juga dengan beberapa kementerian mengenai industri Batang ini. Jadi, ini investasi tentu pasca Covid kita tidak terjebak pada saat Covid saja.

Lalu, ini PAL memang ini penugasan yang terakhir di tahun terakhir ini saya rasa sudah 3 atau 4 tahun di mana ini penguasaan teknologi pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan kapal selam.

Yang terakhir ini PLN Rp5 triliun ini sebagai tadi bagaimana transmisi gardu induk, distribusi listrik masuk desa, untuk tentu masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang di desa yang sampai sekarang masih ada yang belum mendapatkan listrik.

Dan untuk PMN tambahan *alhamdulillah* ini kembali HK mendapat bantuan dari pemerintah yaitu menyelesaikan penugasan yang ada di tol Sumatera tambahan Rp9 triliun. Dan tentu ini Rp7,9 triliun ini restrukturisasi Waskita yang *alhamdulillah* kemarin juga sudah dirapatkan di Komite Investasi yang dipimpin oleh Pak Menko, Ibu Menkeu, dan tentu jajaran dari kejaksaan karena ini agak berbeda, selain restrukturisasi tapi juga ada *right issue*-nya karena ini perusahaan publik, tetapi di sini tentunya ini bagian dari penugasan yang sebelumnya sudah diselesaikan pembangunan tol Jawa yang hampir rampung selama ini. Jadi, total yang sekarang diberikan Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat adalah untuk 2021 itu *tiga puluh lima triliun koma seratus tiga puluh lima*, lalu tambahannya Rp16,9 triliun.

Untuk.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Bapak Pimpinan sebelum dilanjutkan.

Saya bingung nih Pak Menteri, jalan tol Lintas Sumatera dengan jalan tol Trans-Sumatera bedanya apa sih?

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR) :

Sama Bu, nanti ketiknya dibetulin nanti.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Gitu dong kalau untuk anggaran.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR) :

Baik.

Lalu untuk tahun 2022 sendiri mohon berkenan ini angkanya sudah ada tapi kita masih tunggu apakah ini sudah angka final ini untuk perumnas bagaimana pembangunan daripada tadi program daripada satu juta rumah murah ya nanti mohon dicek saja. Lalu PLN juga sama ini listrik masuk desa. Lalu HK ini masih masih dalam negosiasi ada tambahan 23 + 7,5 ini juga belum nanti. Lalu Waskita ini untuk penyelesaian tol dan tentu yang sisanya ini buat LRT.

Itu saja Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Investasi-Kepala BKPM.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,**

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI dan seluruh Anggota DPR
Komisi VI baik yang hadir fisik maupun yang virtual,
Yang saya hormati Pak Menteri BUMN dengan seluruh Wamen dan
seluruh perangkatnya, dan
Seluruh tim dari Kementerian Investasi Pimpinan.**

Karena hari ini bicara sebagian adalah OSS, saya tidak berani hadir sendiri. Jadi, saya bawa pasukan lengkap Pimpinan untuk bisa menjelaskan OSS gitu. Kalau nggak salah ada Tina tadi ya? Oh, ya nanti urusannya teknis-teknis nanti Tina saja yang jelaskan kepada Pimpinan. Pak Andre nanti urusannya semen lagi nanti. Pak Andre hari ini rapat kerja kita *nggak* ada semen ya ini anggaran.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nggak, kan menjawab tantangan kita, tantangan harus kita jawab.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Pimpinan yang saya hormati,

Saya tidak mengulang apa yang tadi Pimpinan sudah menyampaikan pada pidato pengantar sidang kita pagi hari ini terkait dengan anggaran yang ada pada Kementerian Investasi untuk 2022 sebesar Rp711.513.546.000,- kita langsung bagi saja Pimpinan itu program dukungan manajemen sebesar Rp300.901.232.000,-, sementara program penanaman modal sebesar Rp410.612.314.000,-.

Pimpinan,

Dalam menyikapi perkembangan kebutuhan investasi 2022 karena target pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 5% maka kami diberikan target realisasi investasi di 2022 itu sebesar Rp1200 triliun, jadi di 2021 itu kami dikasih target Rp900 triliun dan atas agenda rapat yang tadi Pimpinan sampaikan agenda tambahan bahwa dari Rp900 triliun tersebut kami sudah menyelesaikan pada sampai semester pertama sebesar 49,5% dengan komposisi Jawa dan luar Jawa itu berimbang Pimpinan. Kemudian PMA-PMDN PMDN juga berimbang dikit *Foreign Direct Investment* kita lebih tinggi sedikit.

Kemudian anggaran kita untuk ke depan dalam rangka memenuhi target Rp1200 triliun Pimpinan itu kita kemarin telah mengusulkan untuk penambahan sekitar Rp600 miliar Pimpinan. Pada rapat sebelumnya juga sudah kami laporkan di dalam forum yang terhormat ini tentang permohonan tambahan anggaran tersebut, namun sampai dengan hari ini Pimpinan kami belum berani untuk mengatakan itu sudah pasti karena masih terjadi lobi-lobi dalam meyakinkan pihak Kemenkeu untuk untuk bisa sekalipun tanda-tanda perubahan zaman ke arah yang lebih baik sudah semakin hilalnya sudah semakin dekat. Pak Andre bocor Pak Andre ini.

Jadi, Pimpinan adapun anggaran untuk Rp600 miliar tersebut kami bagi dalam beberapa poin yang pertama relokasi peluang investasi. Kemudian relokasi perusahaan asing untuk masuk. Kemudian Pimpinan ternyata di negara kita Pimpinan itu ada Rp2900 triliun potensi investasi yang sudah difasilitasi oleh negara sejak tahun 2017, 2018, 2019, sampai 2020 yang insentifnya sudah diberikan berupa *tax holiday* maupun *tax allowance* namun itu belum tereksekusi.

Kemarin di 2020-2021 kami fokus menyelesaikan investasi mangkrak Rp708 triliun, dari Rp708 triliun tersebut sudah terealisasi Rp546 triliun sisanya tinggal sedikit. Nah, di 2022 kami fokus untuk menyelesaikan program Rp2900 yang sudah mendapat insentif fiskal, namun perusahaannya belum belum bisa menjalankan. Nah, ini kita lagi bedah dibantu dengan Satgas kalau memang itu hanya sekedar bisnis *casual* kami akan melakukan langkah-langkah komprehensif terukur agar negara tidak disandera oleh saudara-saudara saya atau teman-teman kita yang menjadi pengusaha yang telah mendapatkan insentif maupun izin-izin lain dalam rangka menjalankan

usahanya. Saya meyakini bahwa pengusaha-pengusaha itu termasuk dalamnya teman-temannya Pak Andre, jadi saya juga akan melakukan evaluasi itu supaya ada kroscek *balance* itu bisa berjalan.

Itu menyangkut dengan anggaran Pimpinan dan saya pikir Rp711 miliar ini sesuai dengan arahan Pimpinan tidak usah untuk kita perdebatkan lagi karena barangnya udah jelas. Sekarang masuk kepada OSS Pimpinan.

Pimpinan yang terhormat,

OSS ini adalah bagian implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 174 poin A dan B yang turunannya diterjemahkan dalam PP Nomor 5 dan PP Nomor 6. Tujuan dari pada Undang-Undang Cipta Kerja salah satu di antaranya adalah memberikan kepastian, kemudahan, transparansi, dan efisiensi. Sudah barang tentu ini sebagai instrumen bagi pelaku usaha untuk bagaimana bisa meningkatkan *trust* negara kepada investor baik dari dalam maupun luar negeri, baik besar maupun kecil.

Nah, sekarang implementasi tersebut sudah kita lakukan Pimpinan namanya OSS berbasis risiko, ini namanya risiko-risiko Pimpinan. Perbedaan-perbedaan yang sangat fundamental salah satu di antaranya adalah ketika OSS versi 1.1 atau 1.0 itu dulunya tidak berbasis risiko dan sekarang berbasis risiko. Contoh dulunya izin lokasi Pimpinan sekarang sudah berubah menjadi KKPR. Jadi, izin lokasi ini Pimpinan dulunya itu ada di wilayah daerah sekarang sistem dengan tata ruang ini ini ini KKPR ini hubungannya dengan Kementerian ATR, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Nah, coba menterinya aja baru baca 3 malam lalu ini ini karena PP Nomor 5 sama PP Nomor 6 kita satu periode pun baca untuk menghafal *nggak* bisa selesai. Jadi, makanya saya bawa teman-teman tim biar lengkap.

Kemudian izin lingkungan itu sekarang menjadi persetujuan lingkungan ya izin lingkungan sekarang menjadi persetujuan lingkungan. Kemudian IMB sudah berubah Pimpinan sekarang menjadi Persetujuan Bangunan (PBG) dan SLF, dan IMB dulunya masuk dalam bagian sistem perizinan sekarang dia tidak termasuk bagian perizinan. Izin bisa kita keluarkan tanpa ada proses IMB-nya, IMB-nya aja terakhir bisa yang penting kesesuaian tata ruangnya itu sudah masuk pada KKPR.

Kemudian Pimpinan, kami juga Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia sistemnya KBLI Pimpinan. KBLI kita itu ada 1790 KBLI, dari KBLI 1790 itu diturunkan di-*break down* dengan *sub-sub*-nya itu menjadi 3801 KBLI Pimpinan. Yang *break down*-nya itu ada di layar yang paling besar itu adalah KBLI di Perindustrian 1213 KBLI, Pertanian 715 KBLI, Perdagangan 524 KBLI, Lingkungan Hidup dan Kehutanan 346. Saya pikir saya tidak perlu menjelaskan sampai membacakan waktu habis. Jadi, cukup ditayangkan saja.

Kemudian Pimpinan dalam risiko itu dibagi menjadi 3, ada risiko rendah, ada menengah rendah, ada menengah tinggi. Penting saya jelaskan Pimpinan bahwa dalam proses AMDAL pada usaha skala yang menengah

tinggi itu wajib AMDAL, tetapi kalau rendahnya Pimpinan itu untuk UMKM itu namanya ada pernyataan. Kenapa? Karena contoh di kampung saya Pimpinan membangun kebun 1 hektar biaya AMDAL-nya itu bisa sampai dengan Rp600 juta, modal untuk membangun kebun itu tidak lebih dari Rp400 juta jadi biaya AMDAL lebih besar daripada investasi kebun. Maka keberpihakan kita kepada rakyat kecil adalah bagaimana kita memitigasi untuk memberikan izin yang tidak memberatkan bagi pelaku skala rendah, itu salah satu contoh-contohnya Pimpinan. Contoh juga katakanlah sekalipun dia itu UMKM tapi kalau risiko tinggi dia harus mempunyai izin operasi yang berisiko tinggi seperti apoteker itu sekalipun modalnya sedikit tapi itu kan butuh spesifikasi Pimpinan. Jadi, *nggak* bisa kita melakukan gerakan tambahan.

Nah, Pimpinan OSS versi baru ini seperti apa sih? Jadi OSS ini Pimpinan kita bagi menjadi 4 kamar. Kamar pertama adalah kamar kabupaten/kota. Kamar kedua adalah provinsi. Kamar ketiga adalah kementerian/lembaga. Dan kamar keempat adalah yang ada pusatnya di Kementerian Investasi, karena lembaga pengelola OSS itu adalah BKPM menurut perintah daripada PP. Jadi, sekali lagi Pimpinan kami dari Kementerian Investasi tidak bermaksud. Selamat datang Prof. Kami tidak bermaksud terkesan bahwa izin itu di Kementerian Investasi, tapi karena ini perintah undang-undang dan perintah PP Pimpinan. Jadi, biar *clear* juga ini barang.

Nah, sekarang bagaimana sih OSS ini? Bisa Tina bisa *online* *nggak*, buka *dashboard*. Pimpinan agar tidak ada dusta di antara kita terhadap apa yang saya laporkan, maka saya langsung ambil *dashboard* yang *online* dari kantor Kementerian Investasi. Pimpinan, sejak presiden meluncurkan tahun bulan Agustus tanggal 9 hari ini NIB yang sudah keluar itu sebesar 220.515 ini *online* Pimpinan *realtime*, setiap 30 detik itu gambarnya kan kabur-kabur artinya data masuk. Jadi, kalau sudah seperti ini Pimpinan sesuai dengan Pimpinan dulu waktu kita masih aktivis ajaran Pimpinan kan hanya kepada Tuhan yang kita percaya, aktivis butuh data. Agar saya tidak dibilang bahwa tidak punya data saya keluarkan ini Pimpinan dengan ya itu artinya, bukan, jelas supaya Pak Andre tidak tanya lagi di mana izin semen nanti saya jelaskan nah Pak Andre.

Pimpinan ini izin ini ini *nggak* bisa kita main-main, kenapa? Karena itu semua provinsi ada di situ. Coba bikin yang satunya dong yang bisa kita tahu berapa izin yang per sektornya coba Tina. Nah, coba lihat ini Pimpinan, itu bisa kita ketahuan, izin mana yang belum beroperasi, di kementerian mana, apa alasannya, mandeknya di mana ini bisa ketahuan.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Sebentar Pak Menteri, itu diperjelas Pak Menteri mulai tadi nanya ke belakang siapa mbak siapa namanya yang jelas itu namanya?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Gimana, gimana?

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Namanya siapa jadi nama yang Bapak tadi tanyakan mbak siapa itu, bagian apa, dijelaskan, kita bingung.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Oh. Ini Tina Talisa.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Nah begitu Pak, begitu. Terima kasih.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Dia staf khusus.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Oke, terima kasih Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Yang khusus menangani OSS.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Siap.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Jadi, kalau ada pertanyaan apa Bapak-bapak yang terhormat belum *clear* di ruangan ini menyingkat waktu, bisa ditanyakan informal.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Berarti panggilannya Mbak Tina OSS. Oke, iya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Terserahlah biar lebih paten begitu.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Lanjut Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Jadi, buyar presentasi saya Pimpinan. Memang selalu dinamis, elastis, dan fokus.

Jadi Pimpinan, OSS ini *nggak* bisa lagi kita melakukan gerakan-gerakan tambahan. Dari 2200 NIB yang dikeluarkan itu sebesar 317.000 *Project*, jadi 1 NIB itu bisa melahirkan beberapa *project*. Nah, ini kementeriannya langsung *on* di situ. Pertanyaannya adalah apakah OSS itu sudah sempurna? Pimpinan saya ingin mengatakan OSS ini belum sempurna 100%, kenapa? *Handicap*-nya ada pada dua hal, tidak ada aplikasi di dunia ini yang begitu langsung dijalankan langsung semuanya 100% jadi, pasti ada *trial error*-nya ada juga dan kita baru baru satu bulan, target kami akan selesai total itu di akhir tahun ini.

Ada dua masalah *handicap*: Yang pertama itu adalah pengawasan, bagiannya itu belum masuk, dalam beberapa kesempatan kami laporkan bahwa OSS ini baru 80%. Yang kedua adalah sebagian kementerian yang belum terkoneksi sebagian, tapi bagiannya udah bagus. Masalahnya bukan karena tidak mau tapi sebagian masalahnya karena persoalan teknis yang insya Allah akan saya selesaikan untuk apa penyambungan itu di bulan Oktober ini.

Kemudian di KEK juga Pimpinan, ini langsung *online* di KEK 19 KEK juga masuk, kemudian di 5 KPBPB di *Trade Zone* kawasan. Nah, di sini juga ada Pak Lubis, Pak Lubis ini adalah staf khusus yang mendampingi Tina ini koordinator staf khusus, mantan Deputy di BKPM yang lama sekali Pimpinan. Saya kalau Pimpinan sudah bicara OSS ngeri-ngerri sedap soalnya saya.

Saya pikir Pimpinan demikian pengantar saya terkait dengan OSS, saya tahu bahwa ini masih dalam perbaikan-perbaikan. Kalau ada pertanyaan kami siap untuk menjawabnya baik tertulis maupun lisan, tapi andaikan pun kalau sudah cukup dipahami saya ucapkan terima kasih.

Demikian Pimpinan, saya kembalikan kepada meja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih paparan dari Menteri BUMN maupun Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait dengan rapat hari ini.

Kami perlu sampaikan juga Pak Menteri, Pak Wamen terkait dengan PMN 2021 maupun yang PMN 2022 kita sudah melakukan beberapa kali RDPU untuk pendalaman-pendalaman yang mana Komisi VI selalu menginginkan hal-hal yang terkait dengan Penyertaan Modal Negara ini sebelum dan sesudahnya ikut mengawal. Yang mungkin di bawah Pak Wamen Pahala Nugraha Mansury maupun yang di Pak Wamen Pak Kartika Wirjoatmodjo yang mana kita dasar, tujuan, prasyarat, dampak, serta eksekusi dari masing-masing PMN ini kita dialami masing-masing sebagai fungsi pengawasan kami pada saat PMN-PMN itu di dicairkan atau dilaksanakan di dalam proyek-proyek yang terukur.

Sesuai dengan hal-hal yang terkait dengan cara pandang politik anggaran kami di mana *cost ratio* berapapun jumlahnya itu harus terukur *benefit* untuk sesuatu yang bermanfaat buat kesejahteraan, apalagi di era pandemi semacam ini. Jadi, kadang ada yang mempertanyakan kenapa RDPU-RDPU itu dilaksanakan karena kita ingin mempertanggungjawabkan dasar maupun tujuan dari pemberian PMN ini kepada public, ini yang perlu kami sampaikan dan terima kasih kepada Pak Menteri yang telah menyampaikan. Selamat datang Pak Ketua. Apakah masih ada tambahan dari Pak Wamen untuk hal yang terkait dengan PMN, lanjut.

Selanjutnya kami persilakan kepada kawan-kawan untuk menyampaikan pendalaman. Sesuai dengan aturan yang ada saya akan memulai dulu dari juru bicara masing-masing fraksi baru kemudian nanti saya berikan kepada kawan-kawan anggota lainnya kalau toh kita sepakati masih butuh adanya satu tambahan-tambahan informasi atau pendalaman lainnya.

Yang pertama kami persilakan juru bicara dari Fraksi PDIP Perjuangan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya sebenarnya *nggak* banyak yang mau ditanya Mbak karena melihat presentasi yang cuma segini apa sih yang mau ditanya ya Pak Menteri ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa begini Pak, kita tahu tantangan BUMN kita kan sangat sulit sekarang dan *appetite* di apa namanya di BUMN itu kan memang *nggak* pernah mau anggaran yang gede-gede.

Tapi masalahnya kan persoalan kita ini banyak banget nih soal BUMN, laba kita 2019 anjlok sampai tinggal Rp28 triliun, kemampuan kita memberikan keuntungan dari besarnya aset dan segala macam cuma 1% di bawah 1% ini kan *problem-problem* ini apakah akan bisa dijawab oleh anggaran kita yang cuma sekian Pak, ini yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana kita bisa *me-leverage* kembali BUMN ini dengan apa namanya anggaran yang cuma segini, ini menjadi pertanyaan.

Apakah Pak Menteri mungkin punya bayangan lain atau katakanlah banyak skenario lain supaya Kementerian BUMN yang mampu mendorong kembali apa namanya BUMN kita ini, karena kita tidak bisa lagi berlindung hanya pada Covid Pak. Karena kan kalau datanya yang kita lihat itu dari tahun ke tahun selama 4 tahun terakhir kan memang terus menunjukkan tren yang yang menurun nih. Jadi, kan saya kira ini ada *fundamental problem* yang benar-benar harus kita selesaikan. Nah, itu apakah bisa dijawab dengan anggaran ini, pengembangan sumber daya, penetapan SOP yang benar, membuat perencanaan yang benar, ini kan menjadi pertanyaan yang *nggak* bisa dijawab oleh presentasi kita yang singkat ini.

Yang kedua saya ingin mengingatkan kementerian bahwa restrukturisasi ini seperti Paracetamol Pak, jadi kalau sudah *restruct* semua ke *old habit* lalu perusahaan nanti *problem* lagi. Nah saya berharap *restruct* ini jangan meninabobokan BUMN kita Pak, harus benar-benar menjadi bagian integral dari penyehatan perusahaan, *core business*-nya, bukannya,

optimalisasi asetnya, ini kan semua persoalan apa namanya *fundamental problem* karena kalau *nggak* menyelesaikan itu saya khawatir nanti yang namanya PMN, yang namanya restrukturisasi hanya menghasilkan sesuatu yang berulang dan berulang dan berulang.

Nah, ini yang saya kira apa namanya harus kita apa namanya perhatikan Pak Menteri, tantangan buat Pak Menteri karena ini mau masuk ke pertengahan periode pemerintahan Pak Jokowi saya kira yang perlu kita ini. Kami setuju dan sebenarnya berharap PMN itu bisa lebih besar terutama yang terkait dengan penugasan dan pengembangan ya. Jadi, harapan kita sih sebenarnya tidak menolong yang sakit berat karena sakit berat tidak akan ditolong hanya dengan menyuntikkan dana saja saya kira.

Nah, yang ketiga kita berharap Pak ini benar-benarlah yang di bawah kemarin kita mendengar bahwa sudah ada 2 BUMN yang di-*merger* ya dilikuidasi kemudian di-*merger*-kan, 3 ya. Nah, saya kira ada banyak lagi nih yang dalam ICU yang harus diberesin dengan cepat supaya jangan menunda-nunda persoalan dan hanya terus *bleeding* kecil-kecil tapi akhirnya menjadi bisul yang mempengaruhi kinerja Kementerian BUMN secara keseluruhan. Kalau ada yang mau dilakukan apa namanya konsolidasi kita dukung Pak supaya beban juga semakin berkurang karena tidak ada gunanya memelihara-memelihara bisul-bisul seperti itu.

Dan yang ke-empat saya kira kembali kami berharap bahwa proses-proses apa namanya *recruitment talent pull* itu memang benar-benar kita apa namanya seriusi karena saya juga ada kami ada sedikit kekhawatiran karena semakin banyak BUMN ini yang pengurusnya di *top management* itu tidak berasal dari dalam. Ini kan perlu suatu apa namanya mungkin kalau di *top management* banget ya okelah tidak bisa dihindari sesuai situasi BUMN itu, tapi di bawah itu Pak benar-benar kami minta diperhatikan dengan benar supaya benar-benar mereka yang punya *core competencies* yang ada di dalam level VP, SPV, dan seterusnya itu betul-betul harus di sana. Ya, kami hanya bisa berdoa Pak mudah-mudahan ditemukan cara-cara terbaik untuk BUMN kita keluar dari kesulitan ini karena saya kira pada akhirnya ini seolah buat *leadership* kok.

Saya kira itu.
Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Oh Menteri Investasi. Oh iya Menteri Investasi ini lupa saya karena biasanya WA aja langsung dijawab sekarang, setelah jadi Menteri ada perubahan saya lihat.

Kami titip Pak Kalimantan Utara karena itu akan menjadi *buffer* apa namanya apa namanya daerah penyangga ibukota negara. Jadi, kita harapkan benar-benar di ini sehingga harus benar-benar memberikan efek terhadap daerah di Kalimantan. Nah, kami melihat bahwa memang meningkat Pak ya tumbuh sekitar 8,3% pada triwulan kedua tahun ini ya itu sebesar Rp900 triliun sudah hampir 50% terealisasi. Lagi-lagi kami mau ingatkan Pak ini harus menjadi bagian dari upaya kita melakukan redistribusi keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, jangan lagi hanya orang ambil untung singkat dan pergi dari kita.

Lalu kemudian kami berharap juga Pak supaya pelibatan apa namanya pelibatan masyarakat setempat itu ya itu benar-benar sesuatu yang konkret karena kami melihat banyak misalnya kebun sawit dapat izin plasma segala macam itu omong kosong Pak ya. Lalu kami juga mendengar bahwa Kementerian Kemendagri itu sedang merancang PP tentang wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat, tolong ini hati-hati dilihat Pak karena pertambangan emas di Indonesia ini pemainnya cuma ada 5 Pak, ke seluruh penjuru negeri kita pergi 5 orang ini. Nah, kalau kemudian mereka berkolaborasi dengan bupati atau gubernur tidak akan memberikan apa-apa bagi rakyat.

Jadi, tolong diperhatikan, kami harap mungkin BUMN juga bisa bekerja sama nanti di wilayah-wilayah yang sudah diberikan izin pertambangan rakyat atau wilayah pertambangan rakyat mungkin seperti Antam atau yang lain itu bisa menjadi *coaching* atau katakanlah mentor ya untuk usaha rakyat ini. Nah, mungkin nanti bersinergi dengan Kementerian ESDM supaya itu lagi-lagi rakyat mendapat manfaat langsung dari kekayaan negara Pak, jangan lagi hanya apa tuan-tuan uang di sana karena dalam pertambangan tradisional Pak yang namanya peti itu setiap hari ada rakyat mati Pak dan mereka terus jadi kuli, *nggak* peduli mau dapat berapa ratus ton didapat dari wilayah itu tetap jadi kuli rakyat kita Pak. Jadi, mohon ini Pak Kementerian Investasi benar-benar bisa memperhatikan.

Lalu ini soal Nikel Pak, ini kan kita melihat investasi terus data jalan tetapi pasar kita sudah *oversupply* ini Pak, ini gimana rencana Kementerian Investasi terkait tata niaga Nikel ini Pak perlu dijelaskan juga kepada kita. Kalau anggarannya kan kita *nggak* perlu pusing-pusing Pak, tapi kami berharap Pak ke depan benar-benar per provinsi atau per apa namanya zona itu bisa diajak juga untuk mengkampanyekan apa namanya daerahnya masing-masing ke luar Pak jangan sendirian karena selama ini saya lihat biaya promosi ke luar negeri itu juga ada di provinsi Pak, ada di kabupaten juga.

Nah, kalau dana ini bisa disinergikan bersama-sama difasilitasi, saya kira akan lebih efektif, itu yang jadi tidak sendiri-sendiri nih Pak hanya untuk ini bukan *climate change*, *climate exchange*, tukar-tukar hawa Pak kan pusing kita uang dibuang hanya untuk tukar-tukar hawa dan belanja-belanja. Nah, ini harus dikonsolidasikan Pak sebagai Menteri Investasi supaya memang *every sent count* ya *value for money*-nya memang benar-benar diperhatikan dan apa namanya hasilnya juga bisa didapatkan dengan baik.

Saya juga mau mempertanyakan Pak ke depan mohon ini kerja samanya dengan Kementerian Perdagangan, kementerian apa namanya Kementerian Industri karena banyak usaha manufaktur kita itu rusak gara-gara aturan di impor kita Pak yang tidak jelas. Ini yang membuat banyak industri tekstil kita, industri yang lain itu hancur, karena apa? Karena di urusan impor-mengimpor ini sekarang jadi ribet banget Pak sehingga jauh lebih mudah menutup pabrik dan menjadi pedagang barang Cina. Ini harus diberesin juga menurut saya Pak, karena kita masih sangat ketergantungan bahan baku yang luar biasa.

Ini mohon perhatiannya Pak kolaborasi dengan dua kementerian itu ditambah Bea Cukai saya kira karena banyak sekali kerugian dialami oleh pengusaha manufaktur kita karena soal aturan ini yang kacau balau kalau menurut saya. Masa kita maunya hanya jadi pedagang barang dari luar untuk market yang begitu besar.

Saya kira itu Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar. Nggak ada. Juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Baik, Terima kasih Mas Bimo.

Pimpinan, Pak Ketua Komisi, Pimpinan Komisi Pak Bimo, Pak Demer, Pak Martin tadi, dan juga seluruh Anggota Komisi VI, beserta Pak Menteri BUMN dengan jajaran Wamennya dan juga seluruh timnya. Pak Menteri Investasi dengan seluruh timnya.

Saya masuk ke Menteri Investasi dulu nih Pak Bahlil ya Ketua Umum saya. Pak Bahlil ada berapa titipan dari teman-teman kepala daerah pas Pak Bahlil bicara soal OSS ini.

Pertama izin lokasi Pak. Izin lokasi yang Bapak sampaikan tadi diurus oleh Kementerian ATR itu yang terjadi adalah banyak izin lokasi itu keluar ya tapi tidak diajak bicara bupatinya pemerintah kabupatennya, sehingga ada yang tumpang tindih Pak Bahlil. Contoh ada di Kabupaten Tangerang ya, izinnya yang dikeluarkan bupati masih berlaku sampai 2021 atau eh 2022 tiba-tiba dari tempat Pak Bahlil dari Kementerian ATR itu sudah keluar izinnya, itu contoh ya. Nah, ini mungkin perlu perbaikan ya bagaimana jangan sampai ada tumpang tindih ya izin masih berjalan tiba-tiba ada izin lagi yang keluar dari versi OSS baru ini, itu satu.

Yang kedua juga soal tadi persetujuan bangunan atau IMB itu, banyak Perda daerah kota/kabupaten ya IMB ini ada Perda-nya menjadi PAD. Nah, tapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tadi hanya persetujuan bangunan. Nah, otomatis Pak Bahlil sejak OSS versi lama berubah jadi versi baru kalau *nggak* salah per 1 Agustus ya? Iya per 9 Agustus nah itu tidak ada namanya peraturan peralihan ya sehingga mohon maaf Pak Bahlil agak berantakan koordinasi kesulitan pemerintah daerah ini ya untuk mensinkronkan dengan OSS versi baru karena apa namanya sistemnya benar-benar berbeda dan tidak *connect* sama sekali sehingga banyak sekali sekarang keluhan dari teman-teman Apkasi itu bahwa ini PAD mereka berkurang.

Nah, saya mohon Pak Bahlil segera saja setelah rapat ini mengundang teman-teman kepala daerah baik Asosiasi Walikota maupun Bupati, semua ini bica di-*clear*-kan ya karena bagaimanapun juga pemerintah daerah tentu akan mendukung gerak cepat pemerintah pusat, tapi tentu harus bersinergi dan jangan sampai ya PAD-PAD di daerah juga berkurang. Itu titipan dari teman-teman kepala daerah.

Lalu yang kedua Pak Bahlil soal Nikel menyambung yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus tadi. Saya ingin sampaikan Pak Bahlil dalam waktu berapa yang lalu teman-teman Asosiasi Nikel Indonesia kan sudah melaporkan praktek apa namanya permainan survei itu Pak Bahlil ke Kementerian Perdagangan ke Kementerian Perdagangan, satgas Kementerian Perdagangan sudah memanggil Asosiasi Pengusaha Nikel maupun Asosiasi Surveyor.

Nah, *problem*-nya adalah mereka sudah memberikan laporan itu ke Kemendag sekarang mereka mendapat ancaman balik bahwa mereka yang melapor itu di-*blacklist* oleh smelter-smelter Tiongkok itu. Pertanyaannya, kalau mereka di-*blacklist* karena melapor ke mana mereka bisa menjual sumber daya alam ini lagi ya karena pemerintah sudah menutup pintu ekspor. Nah tolong Pak Bahlil pikirkan karena teman-teman Asosiasi Pengusaha Nikel itu kan teman-teman Pak Bahlil juga ya, ke mana mereka mengadu kalau bukan Pak Bahlil yang harus mencari solusi Pak Bahlil ya karena mereka mengadukan hak mereka, mereka coba mengadvokasi kebenaran, tiba-tiba mereka sekarang memberikan data ke pemerintah mereka dapat ancaman balik ya. Melapor ke Kemendag mereka dapat ancaman balik, mereka di-*blacklist* tidak bisa menjual lagi. Nah, itu tolong dicarikan solusinya oleh pemerintah karena bagaimanapun juga pengusaha nasional kita harus kita lindungi.

Lalu yang terakhir Pak Bahlil soal semen ini yang agak menarik dikit. Pak Bahlil dalam rapat 30 Agustus tahun.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Pimpinan, mohon maaf Pimpinan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nggak apa-apa.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

OSS kok kenapa muncul semen lagi ya Pimpinan?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nggak apa-apa, ini kan hak konstitusi saya bicara. Pak Bahlil harus tahu Anggota DPRRI dipilih oleh rakyat bukan ditunjuk oleh presiden, beda ini. Nah, Pak Bahlil duduk di sana mewakili presiden sebagai pembantu presiden rapat dengan kami. Nah, itu perlu Pak Bahlil ketahui konstitusi itu, itu bedanya. Iya dong kan harus kita jelaskan sama Pak Bahlil.

Jadi, Pak Bahlil yang saya hormati, ini bukan soal konkret ini soal bela rakyat bos.

Pak Bahlil yang saya hormati,

Sebentar, Pak Bahlil dengar dulu saya bicara, kita bicara adu data. Pak Bahlil bicara 30 Agustus di ruang ini pas persis di duduk tempat Pak Erick Thohir ini menyampaikan saya akan lakukan audit ya, kalau datanya salah saya akan buka izin impor, saya akan buka izin pabrik baru, dalam rapat 30 Agustus 2020 itu tercatat Pak Bahlil ya. Dalam rapat resmi ini Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Investasi yang dihadiri oleh juga Menteri BUMN, saya menantang Pak Bahlil lakukan audit investigasi. Saya meyakini apa yang saya bicarakan karena data yang saya miliki Pak Bahlil adalah data dari Asosiasi Semen Indonesia di mana data ini setiap bulan dikerjasamakan atau dikoordinasikan bersama Kemenperin sehingga menjadi data nasional pemerintah dan Asosiasi Semen Indonesia dan data yang saya dapatkan juga dari Semen Indonesia Group.

Nah, dalam data yang saya dapatkan Pak Bahlil, kita bicara soal Kalimantan Pak Bahlil ya saya ingin sampaikan. Kalimantan yang akan dibangun pabrik 12 juta ton itu di Kalimantan Timur Pak Bahlil harus ketahui Kalimantan itu konsumsi semennya hanya 4 juta ton setahun, saat ini Pak Bahlil Kalimantan itu sudah punya kapasitas produksi itu 10 juta ton, dari mana 10 juta ton itu? Saya ingin sampaikan, di Kalimantan itu 10,3 pasnya. Di Kalimantan itu ada pabrik semen ya punyanya Indocement dan juga Conch, itu memproduksi semen. Tapi juga ada semen mill atau penggilingan semen dan juga ada *packing plant* semen, ada punyanya Tonasa, punyanya Bosowa ya dan lain-lain yang akhirnya.

KETUA RAPAT:

Silakan ke substansi.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Sebentar, sebentar Mas Bimo. Kasih kesempatan saya bicara, PDIP bicara Mas Bimo *nggak ngomong* kok, kasih kesempatan saya bicara.

KETUA RAPAT:

Substansinya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jadi, Pak Bahlil ada 10,3 juta ton ya sekarang *oversupply* berarti 6 juta ton, Pak Bahlil produksi pabrik semen baru di Kalimantan 12 juta ton ya 12 juta ya. Pertanyaan saya untuk siapa? Itu satu.

Yang kedua Pak Bahlil saya ingin sampaikan ya, sekarang itu kapasitas produksi semen se-Indonesia itu antara 116 juta ton sampai 120 juta ton ya, lalu konsumsi kita baik dalam negeri dan ekspor itu hanya 70 juta ton, jadi ada *oversupply* hampir 50 juta ton. Lalu utilisasi pabrik kita itu hanya 60% dengan data Kemenperin dan Asosiasi Semen Indonesia pertumbuhan semen kita sampai tahun 2025 itu hanya 4%, otomatis utilisasi kita sampai 2025 itu 78% dan diprediksi sampai 2030 kita tidak perlu bangun pabrik semen baru.

Nah, pertanyaan saya mohon maaf ya kepada menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi, izin pabrik semen baru di Kalimantan itu untuk siapa? lalu dibilang untuk ekspor, ekspor ke siapa? di China orang *oversupply*, Thailand, Vietnam, semua orang *oversupply*, ekspor ke siapa? Akhirnya ujung-ujungnya mohon maaf ya pengawasan kita lemah akhirnya dibanjirilah ya Indonesia kembali abis itu industri ya teman Pak Bahlil semen Bosowa nanti gulung tikar ya teman saya juga, nah teman Pak Bahlil.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Atau jangan-jangan ini ada ada apa aspirasi dari situ mungkin?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Bukan.

Lalu Semen Tonasa ya yang dibawah Pak Menteri BUMN gulung tikar, semen Kupang nanti juga gulung tikar, semen Indocement juga gulung tikar, hampir semua gulung tikar, jadi tolonglah ya. Nah, saya menjawab tantangan Pak Bahlil, Pak Bahlil menjanjikan audit oke kita tunggu audit. Saya ingin sesuai Undang-Undang MD3 Pak Bimo Pasal 98 Ayat(6) bahwa keputusan rapat komisi dan pemerintah itu mengikat ini di-*bikin* kesimpulan. Saya nggak ingin tiap rapat ngomong bicara semen terus. Saya ingin.

KETUA RAPAT:

Kesimpulan rapat Pak bukan kesimpulan Andre.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ya kesimpulan rapat, sebentar Mas Bimo ya. Mas Bimo saya bicara tolong jangan arogan juga jadi Pimpinan. Saya ingin mengusulkan ini menjadi kesimpulan kita punya *legacy* di Republik Indonesia ini ya bahwa urusan semen ini kita memang benar-benar bisa menyelesaikan secara konkret ya. Jadi, saya meminta ke Pimpinan dan teman-teman sekalian sesuai Pasal 98 Ayat(6) Undang-Undang MD3 ini jadikan kesimpulan sehingga kita tunggu audit Pak Bahlil ya supaya *fair*, supaya objektif. Kalau memang ada kelebihan eh kalau memang ada kekurangan silakan Pak Bahlil buka impor silakan Pak Bahlil buka izin pabrik baru, tapi kalau benar *oversupply* 50 juta ton pemerintah juga harus berani cabut itu izin ya begitu loh. Dan harus ada yang riil kita rapat, masa rapat *nggak* ada yang riil gitu loh.

Jadi, kan tolong ini jadikan kesimpulan rapat sesuai Pasal 98 Ayat(6) Undang-Undang MD3 supaya ini mengikat dan ini mengikat pemerintah. Apa gunanya kita ikut pemilu dipilih rakyat kalau kita tidak bisa membela rakyat. Terima kasih Pak Bahlil itu yang saya sampaikan.

Untuk Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir ya. Saya ingin mengapresiasi kami sudah rapat kemarin dengan teman-teman Pupuk Indonesia dan Rekind Pak Menteri. Jadi, jalannya sudah terlihat bahwa memang akan dilakukan restrukturisasi.

KETUA RAPAT:

FGD Pak, belum rapat Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ya FGD-lah ya dengan Rekind. Tapi memang Pak Menteri saya melihat yang diterangkan oleh teman-teman Rekind dan Pupuk Indonesia mereka akan melakukan restrukturisasi, kita akan mendukung langkah-langkah itu bagaimana menyelamatkan EPC satu-satunya milik Indonesia. Nah, hanya memang setelah mereka akan melakukan restrukturisasi Insya Allah mudah-mudahan ini berhasil Pak Menteri. Nah, tentu harapan kami yang kemarin kita rapat itu bahwa Pak Menteri akan melakukan tindakan cepat itu juga bisa terealisasikan. Jangan sampai ya kita sekali lagi juga terganggu kebijakan pemerintah karena ada satu orang yang tidak setuju. Nah, itu perlu juga evaluasi.

Yang kedua Pak Menteri nanti mungkin saya akan dalam di rapat siang dengan Pak Tiko ya soal Reas Indonesia Indonesia Re. Kita tahu bagaimana tadi Pak Menteri menyampaikan IFG mendapatkan PMN Rp20 triliun bahwa Indonesia akan melakukan pembenahan asuransi. Nah, itu yang lupa Reas kita. Reasuransi kita jangan lupa Pak Menteri urus ya bagaimanapun juga Reas ini yang menjamin nanti asuransi-asuransi milik pemerintah, apakah Reas kita nanti kita lempar ke luar negeri atau Reas punya BUMN? Itu jangan dilupakan Indonesia Re itu Pak Menteri dan Pak Tiko ya, jangan hanya kita PMN atau membesarkan asuransinya Reasnya jangan lupa dibereskan itu untuk.

Terakhir Pak Menteri sesuai aspirasi dapil ya yang tunjangan kesehatan karyawan Semen Padang itu sampai sekarang masih berjalan Pak Carlo masih mengurus, tapi saya minta tolong dipercepat Pak Menteri, agak agak lama penyelesaiannya. Saya pengen langkah cepat ya untuk bisa menyelesaikan ini supaya mereka jangan sampai mereka meninggal Pak Menteri, umur di atas 70 tahun hak-haknya mereka belum terpenuhi.

Terima kasih.
Itu saja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Demikian juru bicara dari Fraksi Gerindra. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Nasdem. Dari fraksi, *monggo* Pak.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Baik.
Terima kasih.

Saya *nggak* terlalu banyak. Langsung aja Pak Menteri BUMN dan Pak Menteri Investasi saya sampaikan.

Khusus saya sampaikan kepada Pak Menteri Investasi dan BKPM. Saya membaca ingin melakukan pendalaman ya bahwa untuk tahun anggaran 22 mengajukan tambahan Rp600 miliar, nah di poin 6 itu ada Satgas Percepatan Investasi yang jumlahnya Rp50 miliar.

Satgas tentunya memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian. Saya fokus kepada 416 kabupaten dan 98 kota, 34 provinsi yang menurut saya ini yang sangat perlu memerlukan pengawasan dan pengendalian. Sejauh mana anggaran tersebut bisa menjangkau, sistemnya seperti apa, sehingga pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia dan provinsi se-Indonesia ini betul-betul menjalankan regulasi ataupun perundang-undangan yang berlaku. Tidak lagi di-*puntir-puntir*, tidak lagi dikemas-kemas sedemikian rupa melalui perda melalui apa pun ya, sejauh mana pengawasan dan pengendalian itu sistemnya dan mekanismenya.

Nah, kalau melihat dari paparan Pak Menteri yang di mana ada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sini ada Persyaratan Dasar Perizinan. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha di mana yaitu sebelumnya ada yang namanya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ada Izin Lokasi, ada Izin Lingkungan, ada Izin Mendirikan Bangunan atau IMB dan Sertifikasi Laik Fungsi ya, itu sekarang disesuaikan di mana bunyinya ataupun klausulnya adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(KKPR), kemudian Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan SLF atau Sertifikat Laik Fungsi. Nah, bolehlah ini tulisan sudah berubah, tapi sejauh mana realisasi di masing-masing kabupaten, apakah itu bisa seragam? Apakah itu sudah sama? Apakah itu dilepaskan aja sesuai dengan keinginan daerah?.

Nah saya menanyakan Pak Menteri, apakah ini diberikan semacam juklak semacam keputusan menteri yang memberi *guidance* memberikan *guidance* kepada kabupaten dan kota sehingga tidak menyimpang sehingga sesuai arah dan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja dan keinginan itu. Nah, karena apa? Satgas yang Rp50 miliar tadi itu apakah bisa menjangkau ini. Ini yang yang ingin ingin saya dalam sehingga betul-betul yang namanya investasi itu bisa dikembangkan bisa di di apa ditingkatkan tidak hanya di tingkat nasional tidak regional, tapi seluruh industri kecil semua bisa berjalan karena pada prakteknya di kabupaten kota mereka membikin perda ada ruang-ruang yang masih main masih masih bisa bermain, bermain secara individu, bermain secara apa internasional umpamanya di lingkungan hidup, mungkin dari tata ruang dan sebagainya.

Salah satu contoh di satu daerah saya dari Jogja ya, sudah ada IMB, mengajukan izin untuk usaha masih harus keluar izin bangunan lagi. Nah, apakah nanti di dalam klausul ini persetujuan bangunan gedung ini apa prinsipnya dengan IMB, kalau itu tidak diberikan persyaratan tegas dari Kementerian Investasi maka mereka akan memberikan persyaratan yang macem-macem ya sesuai masih persyaratan yang lain atau pendukung IMB masih sama dengan IMB. Nah, bagaimana mengatasi hal ini.

Mungkin itu aja.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan dari juru bicara Fraksi Partai PKB.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Bimo yang kami banggakan, didampingi spesial Bapak Ketua yang sangat kami banggakan Bapak Faisol Riza.

Abang saya Pimpinan Bang Martin Manurung yang ganteng, dan Seluruh rekan-rekan Anggota Komisi VI yang kami banggakan.

Bapak Menteri BUMN yang berakhlak yang menjadi harapan kebanggaan buat kita ke depan.

Bapak Menteri Bahlil yang insya Allah berakhlak dari awal dulu.

Sebetulnya sebelum Pak Menteri BUMN berakhlak itu Pak Bahlil itu menganggap dirinya berakhlak sudah Pak Masya Allah, Bahlil ya Pak Menteri

ya. Pak Menteri Bahlil ini memang menganggap dirinya adalah menteri jalanan yang sekarang duduk di kabinet yang sangat luar biasa bukti bagi bangsa kita bahwa orang jalanan bisa duduk di atas menjadi pejabat tinggi negara, itu salut kami semua. Tetapi realitanya kita berharap Menteri Investasi BKPM ke depan ini lebih baik Pak, itu yang diharapkan.

Nah, makanya saya berharap Pak Menteri Bahlil dalam investasi ini kita harapkan oh saya sudah pembukaan tadi Pak ya, sudah ya, langsung ya. Sudah ya, saya lupa ini langsung membahas masalahnya terlalu tegang mulai tadi Pak ya. Karena terus terang kalau kami dari Partai PKB penentu pemimpin bangsa ya bukan pendukung, bukan bukan koalisi baru koalisi lama atau apa pun ya, kita mulai dulu dalam sejarah PKB yang penting bisa menghijaukan semua kehidupan Pak. Di dalam warna-warni kuning, merah, oranye dan lain-lain kita hadir disitu menghijaukan membuat tenang karena kepentingan PKB tidak lepas dari kepentingan bangsa itu yang terpenting Pak, kepentingan rakyat itu yang terpenting dari PKB ya kan.

Bagaimanapun juga, siapa pun juga PKB di situ insya Allah akan menjadi penentu dan menjaga kondusifitas negara kita itu sebagaimana Nahdlatul Ulama PKB itu ada tali Pak diikat bumi ini Pak ya kan. Kalau tali ini lepas sedikit Pak, hancur negara ini Pak. Ini menjadi catatan buat pemerintah buat presiden, makanya kita dukung semuanya kebaikan ya kan yang penting itu kepentingan, bukan kepentingan organisasi, bukan kepentingan hanya politik, bukan kepentingan titipan Pak. Kalau kami berbicara PKB di sini tidak mau ribut tenang Pak ya, yang penting nyata buat bangsa dan rakyat itu yang kita harapkan ya kan, itu yang kita harapkan.

Makanya Pak termasuk Pak Menteri Investasi, Pak Menteri Erick ada di mitra Komisi VI adalah mitra yang penuh kasih sayang luar biasa Pak. Bapak boleh cek di kemitraan lain di komisi lain Pak tidak seindah di Komisi VI bagaimana Pak Ketua PKB Faisol Riza yang memimpin didampingi Pak Bimo, Pak Demer, Pak Martin, Pak Hekal ini penuh keindahan kasih sayang Pak ya kan. Bagaimana yang terpenting Komisi VI itu Pak kita harus sinergi Pak.

Makanya Pak Erick, Pak Bahlil kalau ke daerah kita juga punya tanggung jawab sumpah janji dapil, kita dilindungi konstitusi, kita ada undang-undang, kita punya Undang-Undang MD3 melindungi kita. Kita berhak bagaimana kalau bisa kita mengawal Pak kepada konstituen. Kita dipilih rakyat Pak ya mulai urusan ketusuk jarum Pak sampai mati itu kita kontak Pak ribuan orang yang terdata di tim Pak belum yang tidak terdata. Kalau eksekutif lebih layak lebih apa malah *image* kita DPR kadang-kadang negatif Pak ya kan. Nah, inilah Pak perlunya kita sinergi.

Saya yakinlah Insya Allah Pak Bahlil, Pak Erick di sini mari kita menjadi mitra yang penuh kasih sayang yang bermanfaat kepada rakyat dan bangsa ini benar-benar menghasilkan sejarah yang terbaik. Dan saya terbukti ini Pak Erick sudah turun ke bawah saya lihat sampai mengalah-ngalahkan DPR itu luar biasa Pak menyentuh kepada masyarakat yang paling termiskin itu luar biasa, apalagi didampingi oleh DPR-DPR di tiap dapilnya itu waduh lebih

efektif lagi Pak. Kita punya hak konstitusi, kita punya anggaran kok Pak *nggak* usah khawatir, kalau perlu kita buat ramai ya kan mitra Komisi VI para menteri luar biasa Pak. Dan *alhamdulillah* Menteri Koperasi Teten kemarin profesional, Pak Erick Menteri profesional, Pak Bahlil Menteri profesional, Pak Menteri Perdagangan walaupun milik PKB tapi profesional ya kan luar biasa.

Ini sejarah Pak Menteri Komisi VI mitra kita adalah semua rata-rata menteri profesional yang luar biasa dan ini mencakup semua menteri Komisi VI Pak ini hampir semua mencakup Pak mitra kita ini. Mau berbicara manusia sampai mau berbicara pesawat yang ada di atas semua di Komisi VI lengkap Pak, inilah akan menjadi gairah iya kan gitu loh. Makanya kalau saya lagi di partai atau di mana-mana saya tidak pernah bermuluk-muluk saya ingin seperti Pak Erick di apa namanya di menteri atau apa tidak Pak, kami ikhlas kami cukup di DPR bermanfaat untuk rakyat mari kita sinergi bersama dengan masyarakat kami cukup. Saya walaupun dengan Ketum di fraksi Pak ditawarkan ini itu saya tidak, saya ikhlas Pak cukup di DPR walaupun cuma 5 kali saya ikhlas.

KETUA RAPAT:

Mohon dipercepat.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Saya kira itu.

Nah itu yang terpenting kita sinergi Pak karena kita tinggal 2 hari lagi, kita di Badan Anggaran ini tinggal tandatangan Pimpinan untuk anggaran semua ini ya kan. Inilah yang harus kita sinergikan Pimpinan apa yang bermanfaat dan tidak kita sudah sebelumnya kita sudah raker, sudah RDP ya kan tinggal 2 hari lagi, tinggal Pimpinan menandatangani.

Kalau memang ini kita bisa dipertanggungjawabkan baik dari investasi, baik dari Kementerian BUMN dan lain-lain, ayo kita perjuangkan bersama yang penting bermanfaat untuk rakyat, bermanfaat untuk bangsa. Kurang lebih itu wajar namanya manusia *human error*, oknum itu pasti terjadi ya kan, kita semua manusia bukan malaikat ya kan itu wajar, itu yang kita harapkan. Pembukaan saya di awal itu itulah yang penting itu adalah akhlak dari hati kita, kemauan kita, niat kita itu yang kita harapkan.

Yang pertama saya berbicara kepada Investasi Pak.

KETUA RAPAT:

Ini belum.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Ya Pak. Karena Pak Bimo.

KETUA RAPAT:

Waktunya Pak, waktunya Pak.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Kalau kita kan tidak ada titipan apa-apa saya jujur, supaya tenang kondusifitas ini kita iya kan, itu yang pertama.

Bagi investasi. Pak Bahlil, saya pingin Pak gambaran realisasi Bapak di 2021 itu bagaimana Pak ya ya data investasi, ini yang terpenting. Lalu di 2022 bagaimana investasi, bagaimana pengembangan Kawasan Industri Batang dan lain-lain yang sudah tadi disebutkan. Lalu investornya ini ada bener *nggak* siapa, saya pingin betul data kita ini, ini aja. Nah, supaya kita bisa bermanfaat maksimal di situ yang ke depannya saya harapkan itu Pak.

Dan saya berharap Pak Erick juga Pak Pak Bahlil juga usahakanlah Pak kita mengangkat mitra kita BUMN kita yang sudah jelas produktivitasnya, aktivitasnya, profesionalitasnya yang sudah ada kalau perlu tekan ya *project-project* dari luar Pak kerja sama dari luar, karena apa? Kita berefek nanti ke depannya Pak, kita pasti akan hubungan kerja samanya bagaimana, tanggungan kita bagaimana ke depan. Orang lokal kita banyak Pak baik itu BUMN sendiri ataupun swasta kita yang di lokal ini mampu untuk TKDN. Sekarang saya pingin tahu silakan apa yang *nggak* mampu mau berbicara dana anggaran kita mampu, tapi wajar kalau berbicara politis kita *nggak* selesai-selesai. Tapi usahakanlah semaksimal mungkin kita karyakan bangsa kita ya, itu yang kita harapkan di investasi.

Kepada BUMN. Pak Erick memang tidak mudah tetapi sudah menciptakan sejarah bagaimana di saat ini sebelumnya juga tentang hal sebetulnya kan di BUMN ini sudah jelaslah kalau masalah anggaran, tapi bagaimana nanti menata aksi korporasi ini sangat penting Pak Erick tapi harus serius Pak Erick. Aksi korporasi ini Bapak bisa mengatakan seperti ini di jajaran BUMN tapi pantau langsung Pak di mitra-mitra kita di mitra-mitra bawah Pak Erick di di *holding-holding* itu semua benar-benar dimaksimalkan Pak, baik itu *holding*, restrukturisasi, bagaimana nanti IPO ya kan, bagaimana pemberian PMN ya kan, di situ ada. Usahakan Pak saya minta tolong di Fraksi PKB lebih kita mendukung revitalisasi daripada pembangunan baru Pak, aset kita ada, mesin kita ada tinggal revitalisasi lebih maksimal, itu yang kita harapkan Pak Erick.

Mohon Pak Erick BUMN jadikan Merah-Putih kita, itu yang terpenting realisasinya ya kan. Investor lokal, TKDN kita dimaksimalkan semua itu yang kita harapkan. Kalau untuk pencitraan Pak sudah bagus, tidak perlu pencitraan harus ramai, ribut, ya mungkin Pak Andre, Bu Risma dan lain-lain saya saya tidak butuh kalau di PKB ya. PKB yang penting bermanfaat untuk rakyat untuk bangsa Pak Erick, saya sudah salut sama Pak Erick. Tapi Pak Erick kalau butuh pencitraan lebih bagus lagi Pak harus Pak, harus viral gitu loh Pak, harus viral supaya laku.

Pak untuk PMN. Tolong Pak PMN yang selama ini berjalan juga dicek di sini ada Pak Pahala, ada Pak Tiko yang sudah paham sebelumnya Pak. PMN yang berjalan ini banyak Pak, banyak itu *holding-holding* di *holding* gula ya ini untuk kepentingan masyarakat Pak *holding* gula ini Pak, banyak lahan kita banyak pabrik kita mau ditutup bermanfaat buka pabrik baru baru ini saya *ndak ndak* masuk pikiran saya ini *ndak* ngerti saya Pak. Termasuk Pertamina Pak kalau perlu Pak usahakan maksimal BP Migas itu kalau perlu Pak masuk dalam *subholding* itu di Pertamina kalau memang benar. Loh benar Pak, kalau benar itu harusnya itu begitu Pak, itu kami dukung di Komisi VI.

KETUA RAPAT:

Waktunya Pak.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Lalu yang terakhir Pak untuk masalah apa tadi *holding*, gula sudah ya Pak.

BPN Pak. Pak Erick, Pimpinan seharusnya juga berperan di sini masalah Badan Pangan Pak, Badan Pangan jelas kemitraannya itu adalah di BUMN dan Menteri Perdagangan. Usahakan BPN itu Pimpinan diperjuangkan adalah mitra kita di Komisi VI itu harus, supaya ada sinergi *connecting* itu itu ke depan, itu yang kita harapkan Pak Erick. Masalah *holding* semua Pak, masalah Pupuk, tentang Rekind tadi yang dijelaskan temen-temen itu perlu dukungan karena banyak investasi sumber daya manusia kita dididik oleh Rekind itu luar biasa Pak, *engineer* kita saya tahu sendiri yang ada di seluruh Indonesia di perusahaan BUMN itu dari Rekind. Oleh sebab itu, ayo kalau memang bener mau dihidupkan sama-sama tetapi profesional bukan hanya karena kepentingan golongan politis dan lain-lain, itu yang kita harapkan Pak. BUMN yang berakhlak kami harapkan ke depan mitra kita lebih baik.

Saya kira itu.

Terima kasih Pimpinan. Terima kasih semua menteri.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thariq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Banyak tausiyahnya daripada pengawasannya. Selanjutnya, kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrat. Juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Saya *nggak* tahu di sini ada Pak Dhevy, Pak Dhevy ya?

KETUA RAPAT:

Kami persilakan Bu.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Pak Dhevy hadir ya Pak?

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Lagi di toilet.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juru bicara.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Saya aja deh Pak Pak, Pak Bimo. Saya aja yang bicara kalau *nggak* Pak Dhevy. Boleh Pak?

KETUA RAPAT:

Kami persilakan Bu.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, ya.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih atas kesempatan ini.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI dan Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Menteri BUMN beserta jajarannya, Menteri Investasi beserta jajarannya.**

Saya tadinya saya pikir Pak Herman atau Pak Dhevy. Saya hendak menanyakan pertama ke Pak Menteri BUMN, dengan adanya anggaran yang akan digunakan lebih efektif untuk pembinaan termasuk *pasca* dilakukan pengurangan jumlah BUMN agar penggunaan anggaran Kementerian BUMN difokuskan pada upaya konsolidasi *pasca* penggabungan BUMN-BUMN tersebut yang telah dikatakan bahwa terdapat penggabungan beberapa BUMN antara lain PT Bhanda Ghara Reksa dan juga PT Hyang seri dan lain-lainnya.

Kemudian untuk Kementerian BUMN juga saya harapkan nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan proyek-proyek penugasan agar lebih ditingkatkan lagi seperti untuk di PLN yang sekarang ini mencapai TKDN-nya 47,64%. Memang ini ada peningkatan 7% tapi mungkin akan lebih baik lebih diusahakan lebih dari itu untuk tingkat TKDN-nya ke depan. Kemudian juga untuk alokasi PMN diharapkan Kementerian BUMN dapat memberikan manfaat langsung para pelaku BUMN misalnya yang terkait di proyek infrastruktur jalan tol bagaimana Pak Menteri BUMN untuk menanggapi hal itu untuk tingkat TKDN-nya.

Dan kemudian juga ada informasi dari Kementerian UMKM bahwa baru kalau *nggak* salah kemitraan dengan BUMN baru ada 6 BUMN yang baru untuk membelanjakan di UMKM-nya baru sebesar 4%, mungkin ini bisa lebih ditingkatkan dan berapa targetnya sebenarnya untuk bisa para BUMN kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya beli dari apa namanya mereka membeli komponen-komponen dari para UMKM.

Kemudian untuk Menteri Investasi Pak Bahlil. Saya di antaranya mau menanyakan tentang OSS ini juga di antaranya mengenai perizinan SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air) di mana izin tersebut di daerah belum bisa diproses karena harus terlebih dahulu diproses di OSS padahal di OSS ini saat ini belum ada programnya sehingga untuk restoran-restoran kecil, warung-warung hotel kecil yang akan mengurus izin SIPA itu masih mengalami kemacetan dan usaha terancam tidak dapat berjalan. Mungkin Pak Bahlil bisa untuk menyelesaikannya seperti apa.

Kemudian juga untuk penggunaan anggaran tahun 2022 mendatang mungkin lebih bisa difokuskan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dalam sistem OSS itu nantinya ke depan. Kemudian saya lihat juga dari Pak Bahlil dari apa namanya dari paparannya yang terakhir ada beberapa negara di sini ada petanya New York, London, Abu Dhabi, Singapura, Taipei, Seoul, Sidney, apakah itu yang sekarang lagi bekerja sama mereka untuk menginvest ke dalam negeri masuk ke Indonesia dan negara mana yang lebih dalam waktu dekat ini yang akan menginvestasikan untuk kerja sama dengan Indonesia.

Mungkin itu saja Pak Aria Bima.
Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya *nggak* tahu Pak Dhevry Bijak mungkin ingin menambahkan karena dia yang hadir.

Terima kasih Pak Bima.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami persilakan lebih dahulu Partai Keadilan Sejahtera.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Terima kasih.

**Pimpinan Komisi VI,
Teman-teman Anggota Komisi VI,
Pak Menteri BUMN, Pak Wamen I, Wamen II, Pak Arya dan semua
jajarannya,
Pak Menteri Investasi Kepala BKPM dengan semua jajaran yang saya
hormati,**

Pertama ya memang ini fokus kita pembahasan anggaran ya, tapi mungkin agak sedikit melebar memang masih terkait.

Pertama saya mencermati tentang pemberian PMN ini Pak, pendapat-pendapat kami sudah kami sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Tapi memang ada sedikit hal yang mengusik terkait dengan pemberian PMN ke BUMN-BUMN ini, antara lain misalnya seperti ini Pak PLN dengan BUMN dengan aset *seribu lima ratus sekian triliun* ya dengan utang *enam ratus sekian triliun* kalau nggak salah ekuitasnya sekarang saya membaca tadi di Web-nya itu *sembilan ratusan triliun*. Nah, untuk mengerjakan proyek infrastruktur, ketenagalistrikan, membangun transmisi gardu induk, distribusi listrik pedesaan ya membutuhkan dana Rp5 triliun itu membutuhkan PMN.

Ini sebetulnya kalau kita pikir *nggak* lazim ya perusahaan sebesar itu dengan ekuitas sebesar itu dana Rp5 triliun masih butuh suntikan dari negara. Artinya kan memang ini ada sesuatu yang harus dibenahi ya walaupun kita semua tahu aset PLN yang meningkat segitu besarnya itu hasil dari revaluasi saya cermati kalau *nggak* salah 7 tahun terakhir begitu ya memang menjadi menjadi apa namanya ya ini semoga memang profesional juga gitu bukan karena untuk tujuan tertentu.

Tapi akhirnya menjadi menjadi tanda tanya besar gitu ya sebuah perusahaan terbesar kalau *nggak* salah sekarang asetnya di Indonesia ini atau minimal dua besarnya kan PLN sama Pertamina membutuhkan dana Rp5 triliun untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya ini bisa dibiayai dengan operasi dana operasi rutinlah kira-kira itu masih membutuhkan PMN. Nah, ini tentu saja menjadi tugas Kementerian BUMN untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas ya kualitas segalanya dari BUMN-BUMN kita salah satunya PLN.

Kemudian yang saya soroti juga ini terkait dengan permintaan tambahan PMN 2021 ke PT Waskita Karya yang ini juga beberapa waktu yang lalu itu sudah ada yang menyoroti bahwa proyek-proyek konstruksi yang dinilainya ini untung kok malah itu yang dijual, sementara yang rugi kok malah kita kelola. Ini penguatan modal dalam rangka restrukturisasi dan digunakan

untuk modal kerja dan investasi jalan tol dengan nilai Rp7,9 triliun, ya di satu sisi memang kondisi ini sangat ini sangat kita butuhkan tapi kan bagaimana kita menyehatkan BUMN-BUMN kita ini kan menjadi tugas besar kita tugasnya Pak Erick, Pak Pahala, Mas Tiko juga. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua juga masih terkait dengan hal ini Pak. Saya baru saja membaca ini kebetulan jadi BPS mencatat impor baja kita pada semester 1-2021 itu meningkat 51% nilainya US\$ 5,36 miliar ya. Ini juga apa ya menjadikan BUMN-BUMN kita ini tentu apa dana kita keluar begitu besar, keluar untuk impor dan tugas kita ini bagaimana memandirikan atau minimal mengurungilah ya impor nilai impor kita dalam hal ini baja. Jangan sampai juga tadi kita menikmati impor terus ya, tidak ada peningkatan kemampuan teknologi dari dalam hal ini PT KS ya.

Penguasaan teknologi yang lebih dan tentu saja harus ada *roadmap*-nya sehingga nanti dipadukan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan impor ya. Kemudian juga dengan aturan kewajiban memenuhi TKDN ini nilai impor kita menjadi satu sisi menjadi menurun, kualitas BUMN kita juga menjadi meningkat. Dan juga jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan impor yang mestinya peruntungkan baja impor itu untuk apa itu elektronik ya elektronik otomotif tapi ternyata banyak melakukan impor itu untuk ternyata digunakan untuk konstruksi. Karena itu butuh pengawasan memang bukan semata-mata tugas Kementerian BUMN tapi juga melibatkan kementerian yang lain. Itu Pak untuk Kementerian BUMN Pak Erick Thohir.

Kemudian untuk Pak Bahlil. Singkat aja Pak pertanyaan saya singkat sesuai dengan nama saya yang singkat dan tanggung jawabnya juga mudah, tidak panjang dan juga *nggak* pakai tausiyah kultum kuliah *tujuh belas setengah menit* yang disampaikan oleh Kyai Hasyim tadi. Bukan 7 menit Pak, *tujuh belas setengah menit*.

Ini pertanyaan saya pertama memang berangkat dari terus terang aja Pak Bahlil keawaman saya, ya ini tentang usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi nilainya Rp600 miliar ini ada beberapa kegiatan. Yang nomor tiga itu eksekusi, realisasi, investasi bagi perusahaan penerima fasilitas penanaman modal ada 159 perusahaan. Nah, ini kan saya itu belum kebayang sebetulnya ini kegiatannya apa, tadi ada yang minta perusahaannya apa saja gitu dan juga yang di bawah yang di bawahnya Pak nomor 4 ini eksekusi realisasi investasi mangkrak 80 proyek strategis. Mungkin akan lebih baik kalau kita ini tahu Pak perusahaan dan juga kegiatannya apa.

Kemudian yang kedua, ini pertanyaan klasik Pak yang terkait dengan OSS, terkait dengan perizinan. Jadi nih wujudnya harapan Pak pertanyaan sekaligus harapan, kapan sih sebetulnya ini *roadmap*-nya dari Kementerian Investasi OSS itu benar-bener bisa terintegrasi dari pusat sampai ke daerah Pak. Jadi, benar-bener apa yang diinginkan untuk soal perizinan di Undang-Undang Cipta Kerja itu tuh benar-bener kita dirasakan oleh masyarakat, benar-bener ada kemudahan yang yang luar biasalah dibanding yang selama ini terjadi.

Kebetulan kami ini mendampingi dan sampai saat ini terus mendampingi ya ya usaha-usaha UMKM Pak itu modalnya nggak seberapa dan ini *nggak* satu dua, tapi letih di proses pengurusan perizinan. Mungkin secara umum sih yang terkait dengan pusat selama ini jauh lebih baik dan cepat begitu, tapi kalau sudah menyangkut di daerah-daerah ini macem-macam persyaratannya dan juga tidak mudah untuk ditemui, kadang-kadang kita berpikir masa nih Anggota DPR mesti turun ikut mendampingi. Nah, ini kan kasihan Pak saudara-saudara kita. Belum tentu belum lagi nanti kalau produknya itu terkait dengan makanan ya sertifikasi halal ya, yang lain lain jenis produknya sama tapi lain bentuknya itu butuh butuh apa namanya *nggak* cukup dengan satu sertifikasi tapi butuh beberapa sertifikasi.

Walaupun mungkin bahan bakunya sama tapi karena bentuk produknya berbeda itu membutuhkan biaya yang juga lebih besar lagi.

Saya kira itu Pak Bahlil. Jadi, pertanyaan sekaligus harapan terkait OSS, syukur Bapak ini sudah membawa pakarnya OSS untuk menjelaskan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Iya, baik. Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi XI, eh Komisi *sorry* Komisi VI masih keceplosan ini,
Pak Menteri BUMN beserta Pak Wamen dua-duanya hadir.
Pak Menteri BKPM,**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua.***

Ada beberapa hal BUMN Pak Menteri saya melihat selalu yang menjadi diskusi yang agak tajam itu kaitan dengan PMN. Saya mengusulkan sebenarnya kita udah *given* ya kondisinya itu seharusnya penugasan-penugasan itu dilakukan bukan oleh PT Persero tapi oleh Perum kan di undang-undangnya ada, tapi *given* Pak Menteri ada kondisinya sudah seperti ini tentu kita harus mencari solusi agar pembangunan tetap bisa jalan.

Sehingga, muncullah penugasan yang kalau pendekatannya itu *profit oriented* tentu tidak *visible* karena beberapa tol yang kita ketahui sebelumnya itu sudah 4-5 kali ditenderin tidak bisa jalan, tidak ada peminat, sehingga di *take over* oleh beberapa BUMN diberi tugas. Saya udah me-*warning* ini jauh-jauh hari sebelumnya, ini perusahaan-perusahaan yang sangat sehat pada saat itu ini akan sakit gitu. Namun, kan kita tidak punya *choice*, tidak mungkin bikin Perum mendadak pada saat itu sementara pembangunan harus di-*speed-up* untuk mengejar pertumbuhan.

Jadi, saya melihat karena kondisi seperti ini saya berpikir Pimpinan, ini Pimpinan mungkin bisa menangkap pikiran saya. Saya berpikir begini, setiap tahun selalu saja PMN diajukan, reaksi masyarakat berbeda-beda, reaksi di DPR juga tentunya sama. Kita harus berpikir nih Pimpinan dan teman-teman anggota juga bagaimana kita bikin *bill in* gitu loh, BUMN meng-*create* sendiri *source*-nya dia tapi pada saat menghasilkan *profit*, *profit* itu *nggak* di-*take out* oleh pemerintah besar gitu loh. Kalau bisa ya *zero percent* *nggak* usah di-*take out*, tapi ditarget gitu sehingga tidak ada simpang siuran pembahasan PMN dari tahun ke tahun gitu. Jadi, misalnya deviden tahun depan atau 2023-lah katakan, itu betul-betul sepenuhnya dikelola dikembalikan ke BUMN lagi sehingga rencana mereka untuk jangka panjang itu lebih fleksibel gitu mereka tidak was-was membuat program-program kerja gitu. Ini ini pemikiran saya yang mungkin barangkali Pak Menteri saya mengusulkan melalui Pak Wamen nanti kita bisa bikin pendalaman hal ini di FGD.

Nah kedua. Setiap menyampaikan usulan-usulan PMN itu selalu singkat, simpel, dan pendek gitu. Sebenarnya sayang, buat saya pemerintah harus memberikan yang komplet ini yang komprehensif. Bahkan usulan saya juga kalau pembahasan seperti ini harus ada usulan jangka pendeknya seperti apa, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Kita bisa bicara setahun kedepan, 3 tahun ke depan, dan 5 tahun ke depanlah pada pada kondisi tertentu dan itu harus dimunculkan dalam bentuk *balance sheet* tidak dimunculkan dalam bentuk normatif gitu sehingga kami ikut membantu Kementerian BUMN mengawasi langsung juga di lapangan. Karena segitu banyak kalau diawasi sendiri oleh Pak Pak Menteri juga menurut saya agak repot, sementara kami ada di banyak dapil mungkin hampir seluruh dapil kita ada di Komisi VI ini bisa ikut memantau.

Nah, ini ini penting menurut saya. Jadi, sampaikan yang lengkap sehingga tidak ada kesan di publik juga antara DPR dan kementerian ini main mata gitu, ini ini ini kan yang harus kita jaga karena sayang ini ya kementerian yang sudah dianggap sangat profesional sekarang itu kalau dianggap bermain mata dengan DPR kan sayang juga, kami juga berusaha bekerja profesional di sini. Jadi, sehingga terlihat jadi kalau kalau usulan saya juga Pak Menteri nanti secara teknis itu tolonglah disampaikan rencana-rencana yang betul-betul memang bisa kita awasi secara bersama-sama.

Kita bicara misalnya tahun ini PMN perusahaan A dapat Rp6 triliun, kemudian dengan Rp6 triliun itu perubahannya tahun depan seperti apa gitu loh, apakah cukup Rp6 triliun itu atau dia ada kalau dia bicara 5 tahun kan udah ketahuan lagi oh tahun ketiga masih perlu ini perlu ini sehingga gol di 5

tahun itu jelas bahwa ini akan positif atau seperti apa gitu loh. Nah, itu itu yang yang saya lihat yang perlu betul-betul kita kita jalani bersama kalau menurut saya supaya memang ke depan ini bisa kita seiring dan sejalan dengan pemikiran dengan konsep berpikirnya sama gitu loh.

Kemudian buat Pak Menteri BKPM. Tadi saya sepakat itu disampaikan juga kalau anggaran maaf anggaran soal anggaran saya *nggak* terlalu banyak ini Pak Menteri saya sering menyampaikan juga dari PAN itu melihat apa namanya *cost and benefit*, *cost* apa pun yang diusulkan sepanjang *benefit* itu maksimal dan *benefit* itu bisa diyakinkan *auto get the benefit* kita tentu *firm* itu untuk mendukung itu itu poin-poin dari PAN. Tapi kalau tidak sesuai dengan harapan itu tentu di tahun berikutnya kami akan *me-review* gitu, begitu juga dengan Pak Bahlil tentunya. Jadi, kita soal anggaran juga *nggak* terlalu konsen, konsen kita adalah benefit apa, berapa investor yang akan masuk investasi yang akan masuk dengan dengan target-target yang jelas gitu.

Nah, kalau tadi saya sepakat juga supaya ada keterbukaan. Apa saja sih yang ditarget tadi, kemungkinan seperti apa. Mungkin kita-kita di lapangan juga bisa meyakinkan masyarakat bahwa oh ya ini akan datang betul ini dari Qatar atau dari mana pun, itu kita kita ikut meyakinin gitu loh. Karena banyak di lapangan itu kita juga ditanya. Apakah betul akan masuk dari sini? Apakah betul? Kita *nggak* ada punya informasi sementara kita sekarang bermitra. Jadi, gunakan juga corong kami untuk meyakinkan masyarakat sehingga kita sama-sama punya obligasi bahwa oh iya ini sama-sama harus kita realisasikan gitu.

Nah, contoh simpel yang disampaikan oleh OSS tadi itu bagus sekali karena saya melihat IMB yang selama ini selalu menjadi batu sandungan di setiap proses pembangunan di daerah tadi katanya kita tidak perlu IMB lagi tapi perlu apa itu istilahnya bisa interaktif. Izin Pimpinan.

Apa? PBG. Katakanlah kita perlu, nah persetujuan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Izin Pimpinan.

Persetujuan Bangunan PBG itu pengganti daripada IMB.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Ya. Berbeda sama IMB? Artinya kan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Izin Pimpinan.

IMB dulu bagian daripada perizinan. Kalau PBG tidak lagi kita masukkan bagian daripada perizinan selama dia sudah di dalam kawasan

yang sudah ada pada KKPR-nya. Kalau dulu kan sering kita dimainkan kalau *nggak* ada IMB *nggak* bisa bangun.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Ya, betul.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Kalau sekarang selama dia sudah masuk dalam wilayah KKPR dengan spesifikasi yang ada bangun aja dulu, IMB-nya ada di belakang *nggak* masalah.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Nah, ini ini di lapangan ini banyak juga yang berkomunikasi sama kita itu nanti mereka bingung apakah nanti masih ada kunci-kunci dipegang oleh pemerintah daerah misalnya dalam kondisi tersebut sepanjang aturan-aturan yang tadi disebutkan itu bisa bisa dilaksanakan tentunya. Katakanlah di satu area ini betul-betul area misalnya untuk untuk perumahan misalnya atau untuk bisnis distrik, sepanjang itu masuk jumlah lantai ketinggian juga ada ketentuan itu *nggak* perlu nunggu IMB lagi ya? Nah, ini perlu diklarifikasi dan saya rasa juga perlu ada sosialisasi yang *clear* ini. Makin cepat makin bagus Pimpinan karena di banyak daerah itu menunggu keputusan-keputusan pemerintah pusat tentang hal ini.

Itu saja Pak Pak Aria Bima saya singkat, mudah-mudahan padat.

Terima kasih.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah.
Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Jon.

Selanjutnya di virtual juru bicara Fraksi PPP, Ibu Elly Rachmat Yasin.

F-PPP (ELLY RACHMAT YASIN):

Ya. Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI beserta seluruh jajaran Anggota Komisi VI,

**Bapak Menteri Investasi Bapak Bahlil,
Menteri BUMN Bapak Erick Thohir.**

Tadi teman-teman sudah banyak menyampaikan masukan-masukan maupun pertanyaan-pertanyaan ya mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya tidak banyak.

Mungkin untuk pertama untuk Pak Menteri Bahlil dulu masalah investasi. Sebagaimana pada rapat kerja sebelumnya apa Kementerian Investasi memiliki anggaran sebesar Rp930 miliar untuk target investasi sebesar Rp900 triliun, tetapi pada 2022 anggaran justru turun padahal target investasinya naik sekitar 1100 sampai 1200 triliun, ini kan sulit. Jadi, karenanya kami mendukung tambahan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp608,5 miliar ditambah dengan anggaran indikatif yang besarnya Rp711,51 miliar.

Peningkatan anggaran diharapkan juga terjadi peningkatan kinerja, tadi dijelaskan bagaimana kelanjutan proses pembangunan pembangunan OSS yang berbasis risiko yang diimplementasikan secara penuh pada bulan Juli dan Agustus. Namun, kenyataannya Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau di tingkat kabupaten masih belum memahami mereka juga harus berbuat apa setelah terbentuk Kementerian Investasi dengan OSS yang ada. Banyak pertanyaan publik yang bermunculan di daerah, namun dinas masih belum bisa merespon secara positif. Jadi, rupanya mereka memerlukan banyak pencerahan dari Pak Menteri nih.

Jadi, sepertinya program sosialisasi perlu diperbanyak kepada daerah-daerah karena mereka juga banyak belum memahami termasuk publik gitu dengan adanya Kementerian Investasi ini. Mungkin itu untuk Pak Menteri dari Pak Menteri Investasi.

Lalu untuk Kementerian BUMN. Ya, jadi Kementerian BUMN ini juga memiliki pagu indikatif yang pada 2022 yang ditetapkan sebesar Rp208,2 miliar turun dari anggaran 2021 yang sebesar Rp244,8 miliar. Nah, anggaran dimaksud juga dibagi menjadi dua program yakni program dukungan sebesar Rp152,9 miliar dan program pengembangan dan pengawasan sebesar Rp55,3 miliar. Nah, dengan besaran tersebut apakah mampu mendongkrak *profit* BUMN yang pada tahun 2019 sebesar Rp124 triliun sedangkan pada tahun ini menurun tajam yakni hanya Rp28 triliun, lalu bagaimana strategi kementerian untuk kembali meningkatkan laba BUMN dengan turunnya anggaran ini.

Lalu yang kedua saya mendengar rencana Kementerian BUMN yang menerbitkan semacam buku panduan ya yang saya baca dari media-media yaitu untuk konsolidasi seluruh BUMN tentang apa siapa, yang jadi pertanyaan siapa sasaran buku dimaksud gitu? Karena jika buku dimaksud disebarluaskan ke publik apakah akan berimbas baik atau justru menjadi bumerang bagi BUMN. Jika buku hanya untuk kalangan terbatas bagaimana cara membatasi nya? Hal ini saya pertanyakan karena menurut berita-

beritanya buku panduan ini dianggap penting oleh Kementerian BUMN, mungkin saya perlu penjelasan dari Bapak Menteri.

Itu saja yang saya sampaikan.
Terima kasih.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terakhir dari Fraksi Partai Golkar.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Golkar dipergunakan oleh Pimpinannya.

KETUA RAPAT:

Sekaligus Pimpinan.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Terima kasih.

**Pak Aria Bima, begitu juga rekan-rekan yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Wamen, Menteri berdua yang saya hormati,**

Saya tidak banyak berkomentar karena kalau kita berbicara anggaran, anggarannya kayaknya kalau di kementerian lain ini hanya Eselon 3 nih Menteri kita ini ini Rp1 triliun jadi, bahkan mungkin kalau di Kementerian PUPR atau Kementerian Pendidikan di Eselon 4 kali ya anggaran ini. Namun, tugasnya saya lihat begitu besar termasuk Menteri BUMN bagaimana merubah *culture* BUMN yang begitu menjadi konglomerasi-konglomerasi merambah ke mana-mana kemudian mengklasterisasi, belum lagi yang masuk ICU banyak itu ini memerlukan bahkan sampai memerlukan Wamen 2 untuk memperbaiki kondisi Kementerian BUMN BUMN-BUMN kita sehingga menjadi sebesar-besarnya untuk benefit kepada masyarakat maupun ke ruang usaha.

Begitu juga Pak Menteri Investasi saya lihat juga menurun anggarannya malah dari tadinya Kepala BKPM menjadi menteri malah menurun, walaupun wibawa naik tapi. Tapi *nggak* apa-apa orang timur biasanya gitu, yang penting gaya.

Saya hanya ingin sedikit berkomentar tentang semen. Walaupun tidak pada posisi pengawasan, tapi saya juga agak tergelitik juga tentang semen ini. Saya masih bingung ini semen ini yang mana yang kita mau bela ini, satu

kita bela investasi satu kita bela rakyat karena rakyat yang membutuhkan semen tentu rakyat harapannya semen itu harganya murah. Kalau pasarnya banyak ini kan hukum *supply and demand* ya Prof ya benar Prof ya? Kalau ini, ini dosen nih jadi saya harus tanya ke beliau masalah *supply and demand* begitu *supply and demand*. Begitu *supply*-nya besar berarti harga akan turun kan begitu ya, kepentingan masyarakat tentu harga semurah-murahnya dan sering minta semen gratis kepada saya jadi saya tahu kepentingan masyarakat adalah harga semen yang semurah-murahnya.

Dan saya melihat juga ini perlu menjadi pertimbangan kajian tersendiri dari Pak Menteri karena saya melihat juga biasanya kalau terbatas izinnya maka sering akan terjadi yang namanya Oligopoly ya bahkan ada kesepakatan-kesepakatan harga, beberapa kali ditemukan oleh KPPU kita kesepakatan-kesepakatan harga dari mereka ya. Ada kemarin ini pabrik ban ada sempat kesepakatan kena juga di KPPU bahkan pabrik apa sepeda motor juga sempat kena di KPPU karena ada ada sedikit pemainnya, sedikit produsennya terjadilah kesepakatan-kesepakatan itu udah berapa kali.

Saya minta Pak Menteri ini melihat sejauh mana kepentingan daripada pembangunan kita, sejauh mana kepentingan rakyat kita ya untuk persoalan semen ini ya. Bukan berarti saya mengomentari Pak Andre tapi ini perlu menjadi kajian untuk kita sama-sama tentu arahnya merah-putih dan saya juga sangat lucu, kenapa kok sudah *oversupply* semen ini kok masih ada orang yang mau *invest*, di mana salahnya? Apakah yang ada ini sudah tidak efisien, efektif atau bagaimana? Nah, ini yang yang menjadi tentu kajian daripada Pak Menteri.

Itu aja barangkali Ketua, saya tidak banyak menyita waktu. Nanti kita ada pengawasan lagi setelah ini karena setelah anggaran ini diketok di Oktober ini, maka kita akan mulai lagi anggaran mungkin bulan Maret untuk pagu indikatif. Jadi, kita panjang ini punya punya pengawasan sehingga masih banyak kita bisa diskusikan dengan para menteri ini. Setelah indikatif di Maret, baru nanti ke Juli kita akan sampai ke Oktober lagi.

Itu Pak Bimo.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kawan-kawan, juru bicara fraksi yang telah.

F-PG (DONI AKBAR, S.E.):

Pak Bimo boleh tambah sedikit?

F-P. GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Boleh daftar Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Sebentar saya dulu Pak, tambahannya nanti dulu Pak.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Daftar Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada kurang lebih 6 *plus* 7 yang *plus* 1 yang ingin menambahkan dari masing-masing juru bicara fraksinya.

F-P. GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

La Tinro Ketua kalau boleh.

KETUA RAPAT:

Kesepaktannya kita beri atau tidak ini? Beri ya, satu menitan tapi mohon teman-teman ngerti ya. Satu-satu saja, yang sudah mendaftar saya beri kesempatan.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Tommy Kurniawan, daftar.

F-P. GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

La Tinro Ketua. Izin Ketua, La Tinro.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan dari dari dari urutan-urutan yang pertama, Pak Mufti Anam.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Usahakan secepat mungkin.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Oke, terima kasih Pimpinan.

Terima kasih Pak Menteri, Pak Bahlil. Kami lihat *panjenengan* semua sedang berjibaku untuk bagaimana turut memulihkan dampak dari pandemi

Covid-19 ini bukan hanya di sektor ekonomi, kalau kami lihat Pak Erick kemarin berkolaborasi dengan banyak BUMN swasta untuk bagaimana bisa ada ketersediaan oksigen untuk rumah sakit-rumah sakit, termasuk membuat rumah sakit darurat dan sebagainya.

Termasuk Pak Bahlil kami dengar di Papua Barat waktu itu sedang kekurangan ventilator, tapi Pak Bahlil dengan segala sumber dayanya menyediakan ventilator untuk kawan-kawan yang ada di rumah sakit apa namanya di Papua Barat sehingga dampaknya luar biasa ada jutaan masyarakat yang ditolong oleh Pak Menteri BUMN dan Pak Bahlil untuk bagaimana apa namanya pandemi ini bisa tertangani dengan baik.

Kami juga mengapresiasi Pak Erick Thohir yang sudah apa namanya menyatakan dengan keras bahwa tidak ada ruang bagi radikalisasi di BUMN. Ini tentu Pak harapan kami bisa diteruskan agar bagaimana seperti di Kimia Farma tidak terjadi lagi ke depan.

Nah, kemudian yang kedua, tentu kami sangat sepakat atas perencanaan Pak anggaran baik di BUMN dan juga di BKPM. Seperti di BUMN ini harapan kami ke depan Pak ada juga anggaran khusus untuk (*suara tidak jelas*) Pak untuk bagaimana menyiapkan kader-kader kita ini ternyata punya anak-anak muda luar biasa di apa namanya anak-anak SMA, anak-anak kuliah di luar negeri Pak untuk dijemput bola untuk bagaimana mereka bisa balik dan berkiprah di BUMN Pak. Harapan kami 5, 10 tahun ke depan BUMN punya kader-kader yang bagus, punya insan-insan BUMN yang bagus untuk menjadi manajer-manajer yang handal di BUMN ke depan agar BUMN bisa lebih tumbuh dan berkembang lagi.

Kemudian juga Pak Bahlil, kami sangat sepakat sangat setuju untuk bagaimana ke depan ditekankan lagi anggaran untuk di sektor promosi investasi Pak. Luar biasa Pak Bahlil dengan anggaran tadi kata teman-teman seperti di Eselon 4, ibarat peluru satu peluru gimana caranya bisa nembak 10 orang sekaligus Pak. Kami tidak bisa bayangkan kalau anggarannya di atas Rp1 triliun bagaimana ke depan pasti akan jauh lebih optimal lagi. Nah, harapan kami itu Pak.

Kemudian yang ketiga, perkembangan kinerja BUMN. Nah, kalau kita mau jujur Pak kami sampai hari ini tidak tahu angka pastinya berapa sih sebenarnya soal apa namanya perkembangan kinerja keuangan BUMN ini. Seperti kemarin Pak, kami sedang raker dengan PTPN 3 menurut mereka untung tapi Bapak tahu lebih dalam ke dalamnya lagi ternyata dari PTPN 1 sampai 12 banyak yang buntung Pak, banyak yang tidak untung begitu. Begitu juga dengan Pupuk Indonesia, kemarin kami FGD dengan Pupuk Indonesia juga demikian Pupuk Indonesia untung tapi kita telisik lebih dalam ternyata kata seperti kata temen-temen tadi Rekind ternyata rugi ratusan miliar. Begitu juga ada Pupuk Indonesia Pangan yang juga rugi.

Maka harapan kami Pak ini agar bisa transformasi ini bisa jelas, benar-benar benar berhasil seperti yang kata Pak Menteri atau tidak kami ingin data Pak dari 140 BUMN ini Pak sebenarnya yang terus setelah ditransformasikan

ini jadi baik mana sih, yang tetap buntung mana sih, yang tetap rugi mana sih? Nah, kami pengen apa namanya paparan atas hal itu di apa rapat kemudian hari untuk bisa menjadi evaluasi kita ke depan Pak agar ketika holdingisasi, klasterisasi, kemudian apa namanya *merger* ini sebenarnya berdampak positif *nggak* sih sebenarnya untuk BUMN ini Pak.

Kemudian yang keempat Pak, kami sangat sepakat apa yang dilakukan Pak Erick Thohir selama ini keliling memastikan vaksinasi di banyak daerah kami sangat senang Pak kata Pak. Banyak orang bilang, wah Pak Erick Thohir itu ternyata baik, ternyata ganteng, ternyata apa namanya diajak foto mau *grapyak* kalau kata ibu-ibu gitu Pak. Nah, tapi Pak kemarin mohon izin ini bukan apa ini sekedar evaluasi untuk bisa lebih baik lagi. Nah, kemarin di tempat kami kan tiba-tiba ada vaksinasi Pak Erick Thohir begitu di dapil kami Pak. Kami ini kan akhirnya jadi, wah ini kok DPR lain bisa bawa vaksin saya kok *nggak* bisa begitu, wah jadi *nggak* enak begitu ya kan.

Ini bukan apa-apa bukan pribadi karena saya harus jaga martabat konstituen kami Pak orang pemilih kami, Tim Sukses kami, dan juga keluarga kami begitu, maka akhirnya saya kontak kebetulan saya punya apa temen yang dikenalkan Pak Bahlil waktu itu Pak Pramono Anung saya kontak beliau akhirnya *alhamdulillah* dapat bantuan dari beliau vaksinasi, *alhamdulillah* juga didatangi Pak Jokowi. Tapi Pak di sisi lainnya ternyata dibandingkan lagi sama masyarakat wah kalau kalau yang BUMN itu dapat duit Rp100.000 ya kalau ini kok *nggak* ada, akhirnya kita terpaksa ngeluarin duit kita sendiri Pak.

Nah, harapan kami apa Pak harapan kami rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ini Pak harus terus ditingkatkan jangan sampai hal-hal begini terjadi. Iya kalau kami ya untung masih ada segi tabungan, gimana dengan orang-orang lain yang adakan vaksinasi di tempat lain kalau terjadi hal yang sama begitu.

Nah, tapi Pak atas hal-hal yang terjadi ini harapan kami juga tidak kemudian ngurus yang di luar yang di dalam ini kemudian tidak diurus dengan baik. Bapak tahu bahwa di salah satu BUMN kita Pak di salah satu BUMN kita saya tidak bisa sebut namanya Pak karyawannya saya setuju dengan apa katanya Pak Erick Thohir bahwa tidak akan ada PHK di tengah pandemi ini, tapi Bapak tahu mereka iya nurut apa kata Pak Erick Thohir mereka ngikutin, tapi tahu di dalamnya Pak? Ada banyak perusahaan BUMN yang memotong gajinya hingga 50% Pak.

Ini bukan mohon maaf Pak Andre saya tidak bisa menyampaikan di sini karena terkait dengan apa performa perusahaan, citra perusahaan yang bisa mengurangi valuasi perusahaan tersebut begitu. Nah, jadi ini bukan diutang Pak, bukan kemudian nanti sisanya akan dibayar ketika BUMN untung tidak Pak, tapi dipotong 50%. Bahkan Bapak tahu di perusahaan BUMN yang karyawannya mereka itu meng apa mencurahkan harkat hidupnya apa tenaganya, materinya untuk membangun BUMN ini ada yang tidak digaji satu ada yang tidak digaji apa namanya sama sekali Pak dan ini bukan diutang Pak bukan kemudian nanti ketika perusahaan untung mereka akan akan dibayarkan begitu ini apa gajinya tidak, artinya apa? Akhirnya

mereka ya tidak ada pilihan lain harus mundur. Memang tidak di PHK, tapi mereka mau gimana kalau dapur dapur kosong terus akhirnya kan mereka akhirnya mengundurkan diri yang itu tidak dapat pesangon.

Nah, harapan kami Pak kami setuju Bapak keliling ke semua daerah, kita senang rakyat bahagia memastikan bagaimana vaksinasi bisa apa namanya merata di seluruh apa namanya bagian Indonesia ini. Tapi di sisi lain harapan kami jangan melupakan esensi dari BUMN untuk bagaimana memastikan kesejahteraan orang-orang di dalamnya yang sudah berjibaku membangun BUMN ini bisa jauh lebih optimal.

Kemudian yang terakhir Pak Erick, soal restrukturisasi BUMN begitu. Nah, ini kan holdingisasi seperti *merger*, klusterisasi dan sebagainya termasuk model-model baru seperti kemarin yang baru paparan yaitu apa namanya Sinergi Gula Nusantara yang tentunya kami lihat di dalamnya ini memberikan ruang bagi investor-investor asing untuk masuk ke dalamnya Pak. Catatan kami yang pertama Pak adalah jangan sampai aset-aset terpenting bangsa kita dikuasai oleh asing Pak, seperti Pertamina contohnya Pak.

Harapan kami mungkin iya saya sangat tahu bahwa sahamnya mayoritas dimiliki oleh negara, tapi Bapak tahu di bawahnya bahwa ada *subholding* ada hulu, ada kilang, ada *shipping* yang itu apa namanya laporannya ya dalam mengambil kebijakan tidak perlu laporan ke Pak Menteri dan juga tidak perlu dalam aksi korporasinya menyampaikan ke DPR tidak perlu lagi. *Sampeyan* tahu bahwa ketika mereka ini dikuasai oleh asing, *shipping*-nya akan dikuasai oleh asing begitu, termasuk hulunya saya dengar akan dikuasai oleh asing. Bayangkan Pak, ibarat kita ini berdiri pakai kaki kita Pak, Bapak kaki Bapak dipotong Bapak jalan masa mau dengan ngesot.

Nah, harapan kami Pak ini aset terpenting bangsa kita, harapan kami, kami pengen pada kesempatan kali ini ada komitmen dari Pak Menteri bahwa anak-anak asuh BUMN ini tidak ada agenda terselubung bahwa ini akan di.

KETUA RAPAT:

Mohon dipersingkat.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Jadi apa namanya. Mohon izin Pimpinan sebentar *nggih*. Tidak akan dikuasai oleh asing begitu Pak.

Kemudian yang kedua soal restrukturisasi ini, yang kedua soal restrukturisasi ini adalah soal efisiensi. Kalau katanya holdingisasi, restrukturisasi, *merger*, thohirisasi dan sebagainya ini harapan kami kalau katanya itu adalah efisiensi kita lihat contohnya kemarin seperti Pelindo, kita FGD soal kemarin dengan Pelindo. Ternyata oke Pelindo ini holdingisasi untuk bagaimana terjadi efisiensi ternyata tidak, di dalamnya tetap ada regional 1, regional 2, regional 3, regional 4 yang strukturnya tetap ada, tetap

ada president, tetap ada vice president, tetap ada struktur-struktur yang ada. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa tidak ada efisiensi di sini apalagi dalam sektor-sektor yang lain begitu. Itu mungkin untuk Pak Menteri BUMN mohon maaf atas apa namanya mungkin kata-kata yang kurang tepat.

Kemudian yang yang kedua untuk Pak Menteri BKPM. Pak Andre, saya ini kenal Pak saya ini duduk di kursi ini mohon izin mungkin kawan-kawan banyak yang belum tahu saya duduk di kursi ini karena Pak Bahlil, saya anu apa namanya jadi artinya dalam, bukan karena itu juga. Saya pengen menyampaikan bahwa Pak Bahlil ini saya kenal beliau sudah sangat lama beliau tidak mungkin Pak Pak siapa namanya Pak Andre melacurkan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi, artinya saya tidak banyak bertanya karena saya lihat sudah konsepnya sudah bagus juga ya.

Tapi, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak, soal tadi izin lokasi dan sebagainya. Nah, harapan kami jangan tinggalkan pemerintah daerah Pak karena pemerintah daerah ini lebih tahu tentang kondisi daerahnya. Nah, saya lihat saya pengen tahu sih sebenarnya kalau tadi ada empat klaster bahwa ada kabupaten/kota, ada provinsi, kemudian ada kementerian, yang terakhir ada BKPM begitu, sebenarnya posisi daerah ini apa sih fungsinya Pak? Jadi, harapan kami daerah ini tidak jangan terus curiga terhadap daerah saya pikir daerah juga banyak kepala daerah yang sebenarnya pengen daerahnya itu maju tapi kondusifitas daerahnya juga tetap terjaga misalnya pencemaran lingkungan dan sebagainya.

Mungkin sedikit dari dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya Bu Nevi.

Tapi perlu hal yang saya luruskan mengenai vaksinasi yang yang kadang ada 100 perak atau sembako atau 50 perak itu kebanyakan inisiasi dari kawan-kawan sendiri yang mengadakan. Jadi, tidak dari kementerian atau dari pemerintah ini yang perlu saya sampaikan. Saya pun juga mengalami juga pernah memberikan sesuatu untuk lebih memotivasi, tapi yang saya ketahui tidak ada yang dari pemerintah atau dari Kementerian BUMN. Ya memang kadang kita agak bingung pada saat beberapa memang ada ketakutan atau ada ketidakmauan untuk vaksin itu.

Saya kira itu yang sedikit saya perlu sampaikan dan saya kira betul dari apa Pak Anam tadi kira-kira yang paling bagus di tiap daerah itu seperti apa untuk memotivasi atau untuk memberikan semangat untuk mereka-mereka yang kadang-kadang kurang mau vaksin.

Silakan Bu Nevi.

F-P. GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Daftar Ketua.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati, dan Pak Menteri.

Saya ke Pak Menteri Bahlil dulu Pak. Di dalam anggaran tambahan itu ada anggaran Rp95 miliar untuk peta peluang investasi Pak, ini kami sangat setuju sekali karena sebelum investor berinvestasi negara kita dia tuh sudah mendapatkan gambaran akan investasi di mana bahkan seperti gambarannya itu detil.

Tentu peta peluang investasi yang Bapak buat nanti ini harus dipertanggungjawabkan validitas dan keakuratan hasilnya ya karena memang tidak sedikit anggaran yang sudah disiapkan kalau memang disetujui dan Pak Bahlil juga harus menggunakan lembaga dan sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya dalam penyusunan peta peluang investasi. Karena kita tahu tambahan ini kan di masa pandemi antara iya dan tidak Pak, walaupun nanti ada ya tentu Pak Menteri memanfaatkan sebaik-baiknya artinya peta peluang investasi ini harus sudah 10 tahun atau 20 tahun ke depan Pak. Itu yang pertama.

Lalu Pak yang kedua adalah tentang investasi yang mangkrak. Ini Pak Bahlil ini tadi alhamdulillah sudah ada Rp500 triliun yang sudah terealisasi, tapi perlu juga Pak Menteri harus menginvestasi mengantisipasi terhadap upaya-upaya investasi yang bersifat bodong. Ya ini kami pastikan bahwa biaya mangkrak investasi ini Bapak sudah melawan mafia-mafia investasi yang bersifat bodong.

Lalu yang ketiga Pak yaitu tentang OSS Pak. Untuk yang sudah Bapak tadi buat pelaku UMKM yang sudah mendapatkan NIB baru 212.000 sedangkan pelaku UMKM kita tuh ya dengan yang mikro kecil itu ada 64 juta Pak, itu bagaimana kesiapan infrastruktur mendukung terlaksananya penyelenggaraan OSS tersebut Pak? Padahal banyak sekali para pengusaha ya yang akan kita bantu untuk menyelenggarakan OSS tersebut, yang Bapak lakukan baru 212.000. Itu Pak mungkin untuk Pak Menteri Investasi.

Untuk Pak Erick Thohir. Saya singkat saja Pak, lagi-lagi masalah PMN Pak. Sebetulnya kita tahu bahwa dengan kita BUMN ini adalah merupakan lokomotif daripada penggerak ekonomi nasional. Untuk itu, kami mengusulkan menerapkan Kementerian BUMN itu menerapkan sanksi yang tegas apabila tidak tercapai target dari PMN yang akan diberikan.

Itu saja, Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan Pak Doni Akbar.

F-PG (DONI AKBAR, S.E.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

**Anggota yang saya hormati baik hadir secara fisik maupun virtual,
Pak Menteri BUMN beserta jajarannya, juga
Pak Menteri Investasi beserta jajarannya.**

Saya sedikit saja Pak kita tematik saja sesuai temanya hari ini terkait anggaran. Iya karena gini Pak karena yang disampaikan kemarin dari teman-teman rapat di Badan Anggaran itu ke depannya itu kalau bisa Pak Menteri kalau sifatnya sifat pekerjaan itu penugasan Bapak itu mengusulkan jangan sedikit-sedikit Pak pekerjaan 300 miliar, 400 miliar nanti tahun ini mintanya 80 berikutnya lagi nanti mengusulkan lagi. Langsung saja Pak supaya nanti Bapak tidak kesulitan, masalahnya disetujui atau tidak dengan pemerintah itu tugas Bapak nanti untuk meyakinkan merekanya.

Karena kan kasihan Pak nanti ketika Bapak ini cuma dikasih sedikit tiba-tiba Bapak harus mencari pembiayaan ujung-ujungnya dijual kepada asing, ke depannya kasihan buat anak cucu kita. Iya sekarang tidak *visible* Pak tidak menghasilkan, tapi 15, 20 tahun kemudian itu hasil yang berharga buat anak cucu kita nanti Pak. Itu yang pertama.

Dan yang kedua saya sempat baca di media itu Pak Erick itu menargetkan dividen tahun 2022 itu sekitar 40 kalau saya tidak salah Pak ya. Nah, kemarin jadinya sekitar jadinya di angka itu 35,6. Saya mau tanya dengan Pak Menteri yakin *nggak* kalau Pak Menteri secara pribadi BUMN ini bisa memberikan kontribusi sampai dengan di angka 40 T itu Pak? Karena saya lihat Pak Erick ini kerjanya bagus dengan segala macam pencak silatnya itu Pak. Bapak lakukan perubahan dan menurut saya progres saya sangat baik, saya yakin Bapak bisa, Bapak mampu, tapi saya bingung kenapa pemerintah justru yang tidak mau Pak. Jadi, untuk menaikkan dari 36,6 ke 36,7 itu aja target itu pemerintah sangat sulit kemarin, makanya saya hadir di sini saya ingin bertanya langsung dengan menteri yang bersangkutan berapa Pak keyakinan Bapak dan berikan itu dividen itu.

Terima kasih Pimpinan.
Cukup dari saya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Pimpinan bisa daftar Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Selanjutnya ke sayap sayap kiri ada Bu Nevi, Pak Darmadi. Oh Pak Tommy ada toh. Silakan.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mohon singkat-singkat ya.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Ya. Saya langsung saja karena waktu saya pikir.

Yang pertama soal OSS ke Pak Menteri Investasi. Apresiasi Pak, bagus Pak. Jadi, ada kemajuan. Hanya saja saya hanya pingin Pak Menteri saya lihat kan dari beberapa yang pernah saya laporkan itu kan ada ada koordinasi dengan beberapa kementerian yang belum *firm*, apakah itu hanya baru satu kementerian atau banyak Pak? Kemarin kan dengan Kemenkes ya, jadi sampai sekarang belum selesai itu Pak.

Saya saya memaklumi karena itu mungkin baru dan sebagainya, Pak Yuliot dan Pak Imam juga sudah membantu ya Pak Menteri juga turun tangan saya pikir itu bagus sekali. Dari sisi *service quality*-nya Kemenkes eh Kementerian Investasi ini sudah bagus sekali turun tangan dengan Pak Budi, tetapi apakah itu hanya permasalahan dengan satu izin dengan Kemenkes atau seluruh gitu kan karena itu menghambat juga orang berbisnis gitu ya. Nah, apa kendalanya Pak Bahlil kira-kira yang terjadi, ini kan langsung ke lapangan ya karena ada kasus-kasus seperti kayak gini. Ini sudah 2 bulan Pak belum selesai mohon bisa ditindaklanjuti. Nah, hal-hal kayak gini kendalanya apa gitu kan.

Yang kedua soal soal semen Pak. Ini kan masalah *supply and demand* yang Pak memang Pak Menteri sudah janjikan mau diaudit kan, kita tunggulah. Artinya ini satu sisi izin itu kan sudah dikeluarkan ya Pak ya, artinya kalau kemudian dicabut mendadak juga ini ada hubungannya dengan Cipta Kerja juga kita pingin menarik investasi. Nah, ini tentu hal ini juga harus diperhatikan juga Pak ya. Termasuk nanti waktu laporan *supply and demand* termasuk pasarnya potensial pasarnya harus diperhitungkan, jangan sampai yang seperti Pak Bahlil yang ngomong itu *nggak* diperhitungkan untuk 3 tahun ke depan 5 tahun ke depan. Kalau buka pabrik itu kan *nggak* langsung bisa

besok mau buka langsung jadi gitu, perlu berapa tahun persiapannya juga lama dan sebagainya.

Jadi, saya pikir potensial *market*-nya itu juga harus dihitung dengan cermat supaya jangan nanti tiba-tiba *demand*-nya naik mendadak kemudian kelabakan sudah keburu dimoratorium *nggak* bisa buka pabrik dan sebagainya. Dan ada baiknya sumber datanya itu tidak *one side* tapi beberapa sumber gitu. Saya pikir sudah bagus dari Asosiasi Semen sudah bagus, ambil juga dari data-data lain data primer maupun data sekunder sehingga bisa ada perbandingan ya.

Ini satu sisi memang agak sulit, kalau dari sisi perlindungan konsumen dari konsumen pengennya harga murah, dari pelaku usaha sedapat mungkin mainnya sedikit supaya bisa menentukan harga lebih tinggi gitu. Jadi, ada dua sisi yang harus diperhatikan saya pikir. Nah, ini soal dari Pak Bahlil hanya itu aja.

Soal kedua adalah soal dengan Pak Menteri BUMN. Ini saya lihat kan ada BUMN hantu ada BUMN polesan ya dua kutub yang berbeda, yang hantu tuh ada 7 yang sering dibicarakan sudah lama kan *nggak* bisa dilikuidasi. Nanti mohon Pak Menteri bisa kasih kita kasih kita tahu bahwa sebetulnya masalahnya ada di mana sebetulnya. Kalau di perusahaan-perusahaan biasa kan langsung aja kita likuidasi kalau sudah parah *nggak* ada prospek ya, tapi ini kok terkesan lamban gitu apa ada masalah di mana yang paling krusial gitu. Jadi itu yang pertama.

Yang kedua juga ada BUMN yang tiba-tiba untung Pak Menteri. Kita berharap Pak Menteri ngomong kemarin 8 tahun rugi tiba-tiba untung, Krakatau Steel. Kita pernah mengalami masa-masa pahit waktu Garuda kan polesan, ya kan. Nah, ini dua ini harus diperhatikan dengan baik-baik Pak Pak Erick, satu yang hantu ini selesaikannya bagaimana caranya. Yang kedua yang polesan ini jangan tiba-tiba menerima hanya dari KAP kemudian ini sudah untung sudah bagus *nggak* dianalisis, ini memang analisisnya harus tajam ya.

Bagaimana misalnya bisa 8 tahun rugi tiba-tiba untung ini juga tanda tanya Pak ya kan, kayak bayi ajaib. Terus katanya sudah diaudit, kalau sudah diaudit ada juga KAP apa yang nakal yang bisa disulap itu Pak Bahlil, dulu kita sering suruh tuh KAP sulap-sulap. Pak Erick kan juga pengusaha dulu kan, kita bisa atur-atur tuh KAP-nya.

KETUA RAPAT:

Mohon dipersingkat Pak.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Iya. Jadi artinya kita udah tahu sama tahu kan. Nah ini menyangkut ke KAP juga, ada juga yang datang Pak surat Pak Menteri yang 199 itu. Itu dasar penunjukan 12 KAP itu apa Pak Menteri? Karena banyak juga yang

protes datangin saya bertanya, ini kriterianya apa? Dari Kementerian Keuangan mengeluarkan 20 KAP, dari Bapak mengeluarkan 12, dan ada yang tidak terima.

Jadi, ini juga perlu diperjelas karena jumlah KAP di Indonesia ada 540 ya jumlah yang dianggap *qualified* itu ada 20 Pak Menteri, kenapa Pak Menteri milih 12 dan kenapa Pak Menteri milih ada KAP yang ada masalah lagi di skorsing soal Jiwasraya misalnya. Kenapa Pak Menteri juga milih KAP yang dia partnernya ada di mana-mana kantornya kayak Indomaret? Ini pertanyaan Pak di bawah Pak. Nah ini mohon nanti bisa dijawab kepada kami beberapa poin tersebut. Itu saja.

Yang terakhir saya tujukan ke Pak Nasim. Menteri-menteri itu pada dasarnya *nggak* ada pencitraan hanya gaya saja Pak Nasim. Jadi, kami keberatan menteri-menterinya dianggap pencitraan gitu ya. Jadi, mohon, mohon dicabut tuh menteri pencitraan dari PDI Perjuangan.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Daftar Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya forum rapat Komisi VI ini jangan dipakai saling menegaskan menteri dari lintas partai.

Selanjutnya kami persilakan, saya mau sapa dulu.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Daftar Ketua, Pak Khilmi.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Saya udah daftar Ketua.

KETUA RAPAT:

Masih saya berikan waktu, Pak La Tinro.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Saya Pimpinan, mohon izin.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak La Tinro.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Ya. Terima kasih Pimpinan yang saya hormati.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Tolong diizinkan ikut.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

**Menteri BUMN yang saya hormati bersama Menteri Investasi,
Teman-teman Anggota Komisi VI yang saya hormati,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banyak yang ingin saya sampaikan Pak Ketua, tetapi karena masalah waktu saya hanya ingin membawakan satu aspirasi dari masyarakat yang menyampaikan kepada saya dan saya juga mohon maaf kepada BNI karena saya juga nasabah di BNI.

Apa yang viral di Sulawesi Selatan saat ini adalah ada nasabah yang mempunyai dana 70 M di BNI kemudian telah ditarik Rp25 miliar, jadi sisa dana tersebut yang ada dalam rekening mereka Rp45 miliar. Tiba-tiba pengusaha tersebut ingin mengambil dana yang Rp45 miliar, tetapi ternyata sudah tidak ada dalam rekeningnya. Saya tanyakan bahwa apa apakah ada bilyet deposito yang diberikan dia bilang ada, tapi katanya terakhir-terakhir bahwa bilyet giro itu adalah abal-abal.

Oleh karena itu, harapan saya kepada Menteri BUMN, tolong agar supaya pengawasan *intern* dari Himbara ini dapat lebih baik. Apa yang terjadi saat ini adalah katanya sang pegawai tersebut sudah ada ditahan di Bareskrim tetapi kan itu bukan solusi buat pengusaha, pengusaha itu tentu menginginkan bagaimana dana Rp45 miliar mereka bisa kembali kemudian ada proses yang dilakukan oleh BNI.

Yang kedua Pak Menteri, saya boleh dikatakan periode pertama di DPRRI. Apa yang sering kami mendengarkan tentang BUMN adalah BUMN yang rugi, ataupun ada yang bangkrut ataupun korupsi. Pertanyaan mendasar adalah apakah ini karena para BUMN itu terlalu dimanja yang mudah mendapatkan PMN, IPO, ataupun mendapatkan kredit-kredit luar negeri maupun dalam negeri.

Kalau kami pesan-pesan orangtua kami di Sulawesi Selatan selalu mengatakan bahwa pelaut yang ulung itu hanya lahir pada ombak yang keras tidak ada pelaut ulung yang lahir pada ombak yang tenang, mungkin karena kemanjaan maaf kalau saya katakan demikian sehingga banyak BUMN yang rugi. Kalau pengusaha yang yang rugi pasti asetnya disita oleh bank, banyak teman kami yang hanya sekarang tinggal di rumah-rumah kontrakan karena asetnya habis kerugian yang diderita sehingga disita oleh bank. Pertanyaannya adalah bagaimana jika perusahaan BUMN juga rugi, apakah

direksi-direksi semua itu bisa menanggung kerugian-kerugian dari perusahaan yang dipimpinnya?

Yang terakhir mungkin karena masalah waktu Pak Menteri. Saya teringat beberapa tahun yang lalu tahun 70-an kita juga pernah ada ada BUMN yang dapat dikatakan 10 BUMN yang terbesar di dunia bahkan ada yang mengatakan 5 besar BUMN yang terbesar di dunia, ada Panca Niaga, Cipta Niaga, Kerta Niaga, itu perusahaan-perusahaan BUMN dulu 5 besar dunia. Pertanyaannya adalah apakah masih ada aset-aset daripada mereka semua itu, di mana sih aset mereka sekarang?

Oleh karena itu, Pak Menteri mudah-mudahan ke depan apa yang Bapak Pimpin sebagai Menteri BUMN, Bapak bisa keluar *legacy* yang baik, tidak ada lagi kami mendengarkan pada periode-periode selanjutnya setelah Bapak tidak ada lagi BUMN yang merugi, tidak ada lagi yang bangkrut apalagi yang korupsi. Mudah-mudahan Bapak keluar sebagai Menteri memegang amanah dengan predikat husnul khotimah.

Kemudian khusus untuk Bahlil senior saya, pengusaha yang besar juga lahir dari nol saya tahu sampai akhirnya karena dia adalah pelaut yang ulung dengan banyak mendapatkan ombak yang keras alhamdulillah bisa menjadi menteri. Satu pesan dari orang-orang Bugis Makassar untuk Pak Bahlil "*Magetteng Na Malempu*" artinya apa jujur dan konsisten. Kita tunggu hasil apa yang Bapak lakukan apa yang diminta saudara saya, bos saya Pak Andre bagaimana akhir daripada perjuangan-perjuangan yang akan kita lakukan khususnya untuk semen di tengah masyarakat kita.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan Mba Intan.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Daftar Ketua.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI, Pak Menteri BUMN beserta jajaran, Pak Wamen I, II, Pak Menteri Investasi Kepala BKPM beserta jajaran, Bapak Ibu semua yang hadir baik *online* maupun *virtual*.

Karena ini pertama saya dengan Pak Menteri Investasi dan jajarannya. Saya perkenalkan dulu saya Intan Fauzi A-499 Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi. Saya sebelumnya di Komisi IX karena kesehatan sudah di-*take over* Pak Erick termasuk Indofarma, Biofarma, Kimia Farma, semua teknokrat sampai menteri teknokrat, jadi mungkin lebih baik saya bergabung di sini. Terima kasih.

Pak Menteri BUMN. Pak, restrukturisasi pembentukan *holding* BUMN semua *corporate action* yang ujungnya adalah untuk *sustainable* dan *growth* tentu kami dukung. Tapi dari beberapa RDP dengan BUMN antara lain misalnya penerima PMN BNI yang kemudian ada skema komposisi saham dari berbagai persentase sampai dengan 60% di pemerintah, lalu kemudian rencana pembentukan *holding* perkebunan dan divestasi saham dengan pembentukan SugarCo didahului dengan *spin-off* dan sebagainya yang rencananya adalah 51% kepemilikan pemerintah dan 49% investor.

Nah, ini yang saya titip betul adalah komposisi kepemilikan pemerintah walaupun mayoritas 51%, tapi jangan sampai perusahaan pengendali ini tidak bisa membuat arah dan kebijakan perusahaan. Karena kita tahu peraturan perundang-undangan kita mengatur bahwa 51:49 itu hanya sebatas bisa merubah pengurus yaitu direksi dan komisaris, sementara untuk melakukan peningkatan modal *store* dan sebagainya yang mungkin nantinya diperlukan itu diperlukan *dua pertiga* artinya lebih dari 66%.

Juga kalau kemudian harus ada *merger* dan sebagainya itu lebih besar lagi, artinya pemerintah perlu 75%. Jadi, saya yakin kalau Pak Erick nawaitu dan ghirohnya untuk merah-putih tidak diragukan lagi, tapi betul-betul apa yang dilakukan divestasi saham jangan sampai terdilusi dan seyogyanya pemerintah itu kepemilikannya harus bukan hanya sekedar mayoritas 51% tapi lebih dari itu.

Kemudian Pak Bahlil OSS. OSS ini kan tujuannya adalah kemudahan dalam izin berusaha, tapi apakah betul-betul itu sudah sampai ke lapangan? Karena gini Pak, tujuan akhirnya mungkin kemudahan tapi untuk OSS itu sendiri harus merubah dulu kan anggaran dasar antara lain adalah Pasal 3 dari anggaran dasar setiap perusahaan perseroan karena di situ maksud dan tujuannya harus sesuai dengan KBLI yang tadi Bapak bilang walaupun KBLI-nya banyak.

Nah, ini pemerintah mengeluarkan awalnya PP tahun 2017, belum lama kemudian karena memang Undang-Undang Cipta Kerja dikeluarkan lagi PP 2020 yang mulai berlaku langsung di 2020 ini. Selain secara administratif ada hambatan karena memang harus merubah itu dulu baru kemudian bisa dilakukan perizinan yang lain, juga tentunya ada konsekuensi biaya administrasi yang memang mungkin tidak besar tapi kan mungkin untuk beberapa UMKM dan sebagainya.

Dan tentu kita mendorong kawasan-kawasan apakah itu kawasan industri dan sebagainya itu betul-betul pelaksanaan perizinan di lapangannya dengan OSS ini nanti dan sebagainya itu betul-betul ada kemudahan, tadi

seperti Bapak bilang AMDAL itu sesuatu yang itu udah sulit sekali gitu walaupun artinya pemda dan sebagainya memang harus mendukung. Karena yang terjadi akhirnya ada kawasan, infrastrukturnya sudah dibangun dan ini juga penugasan BUMN, tapi kawasan industrinya mangkrak. Atau sebaliknya kawasan industrinya siap, lahannya siap, pembangunannya siap, tapi infrastruktur tidak mendukung karena apakah itu memang anggaran atau pembebasan lahan dan sebagainya dari pemda.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kita akan selesai jam 13.00 WIB.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Maka, saya mohon.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Sebentar saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Khilmi tenang aja dulu, ada masih ada Pak Halim, Pak Tommy, Pak Khilmi, juga Pak Nyoman, maka saya mohon.

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H.):

Saya kalau boleh setengah menit Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ada Pak Ananto.

Saya persilakan Pak Nyoman, oh Pak Nyoman *nggak* ada. Pak Halim, kami persilakan Pak.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Matur suwun Pakde Bimo.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abdul Hakim Pimpinan, bukan Halim.

KETUA RAPAT:

Pak Abdul Hakim.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang hadir secara fisik serta virtual,
Yang saya hormati Menteri BUMN beserta seluruh jajaran, dan juga Menteri Investasi dan Kepala BKPM beserta seluruh jajaran yang kami hormati.**

Kurang dekat.

KETUA RAPAT:

Kurang keras apa kurang dekat Pak Hakim.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih.

Yang pertama saya ke Pak Menteri Investasi. Jadi, kita menyusun anggaran itu untuk mencapai target-target yang telah ditentukan oleh pemerintah, salah satu target yang ditentukan pemerintah adalah kemudahan berusaha (EoDB) targetnya dari 73 pengen turun ke 60 kalau nggak 40-an. Nah, celaknya Pak Bahlil kita barusan kena *prank* nih sama *World Bank*, jadi EoDB udah nggak kredibel dan *World Bank* mencabut itu daripada parameter dalam menentukan kemudahan berusaha. Jadi, anggaran yang sudah disusun untuk mencapai tujuannya ternyata tujuannya *zonk* kita kena *prank*. Nah, kira-kira langkah yang dipersiapkan apa? Satu poin itu saja untuk Pak Menteri Investasi.

Kemudian selanjutnya ke Pak Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN. Saya sebagai salah satu pemuda di Komisi VI Pak Menteri itu mengapresiasi programnya *panjenengan* yaitu adalah BUMN Muda yang mana ini dipersiapkan untuk sebagai penerus daripada direksi-direksi ataupun kader-kader BUMN yang akan melanjutkan ke depannya.

Memang bisa jadi Pak Menteri permasalahan-permasalahan yang dihadapi BUMN ataupun kegalauan suasana kebatinan Pak Erick dari pengusaha kemudian megang BUMN yang mana beberapa BUMN kulturnya ini korporasi rasa birokrasi. Nah, tentunya persoalan-persoalan ini itu bisa

diselesaikan dengan kita mempersiapkan penerus-penerus berikutnya. Jadi, program ini menurut kami program yang sangat baik Pak. Jadi, dipersiapkan dari sekarang, jadi budaya-budaya yang kurang baik di internal perusahaan BUMN itu bisa dieliminasi dan kemudian kader-kader muda di BUMN itu bisa di-*scale-up* untuk jadi lebih baik.

Kira-kira dua poin itu aja Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Monggo. Selanjutnya Pak Tommy Kurniawan.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati, beserta dengan
Seluruh rekan-rekan Komisi VI yang saya hormati, dan juga
Menteri BUMN yang hadir pada hari ini yang saya hormati beserta
dengan seluruh jajarannya, dan juga
Menteri Investasi yang saya hormati beserta dengan seluruh jajarannya.**

Baik.

Pertama saya ingin menyampaikan beberapa hal, saya *nggak* banyak. Kepada Menteri BUMN. Pak, Alhamdulillah kita semua sudah berjalan di periode ini sudah 2 tahun, tentunya saya mengapresiasi apa pun yang sudah dilakukan program-program dari Pak Menteri baik dengan mengurangi BUMN, kemudian *merger*, dan juga lain-lainnya termasuk restrukturisasi.

Saya kira mungkin di tahun ketiga saya mengusulkan bahwa karena sudah melakukan *corporate action* dan juga rencana-rencana lainnya saya usulkan untuk di tahun ketiga kita bicara hasil Pak sehingga kita fokus nanti Bapak membuat matriks mana dari *corporate action* yang berhasil mana yang belum dan apa yang mesti kita lakukan bersama supaya *roadmap* yang dibuat oleh Kementerian BUMN itu bisa berhasil. Saya kira kita perlu mendengarkan hal tersebut karena itu adalah bagian dari fungsi pengawasan kita.

Kemudian yang berikutnya adalah penyakit BUMN Karya dan BUMN lainnya adalah investasi di properti yang gila-gilaan dan banyak yang macet sekarang, apakah ada *subholding* properti? itu Pak.

Kemudian Pak Menteri Investasi *nggak* ada ya. Jadi, saya bisa sampaikan saja kepada jajarannya. Ketika menjadi Kementerian Investasi kemudian seluruh izin ditarik ke atas ini di daerah menimbulkan kebingungan, menimbulkan kebingungan. Kemarin saya berbicara dengan kepala dinas apa namanya badan izin terpadu karena semuanya sekarang ditarik ke OSS mereka bilang bahwa sekarang tugasnya adalah pengawasan ke lapangan.

Nah, saya *nggak* tahu apakah itu sudah dibuatkan regulasinya atau belum karena memang saat ini yang di daerah itu semuanya kebingungan. Saya kira kalau belum ada peraturan menteri mengenai hal tersebut atau peraturan pemerintah saya kira itu perlu dilakukan agar pekerjaan izin yang ada di bawah kalau misalkan memang mereka diharuskan untuk melakukan pengawasan sehingga itu bisa lebih jelas.

Kemudian yang kedua kesiapan kita melakukan transfer *knowledge* atau teknologi dalam rangka investasi itu instrumennya apa aja, kemudian SDM-nya itu sudah siap atau belum?

Yang terakhir adalah saya tentu mengapresiasi apa namanya *platform* OSS yang tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Menteri yang begitu luar biasa, keren, dan hebat. Dulu waktu saya bekerja di kementerian Pak saya bermimpi untuk bisa mempunyai situasi *room* seperti itu Pak, tapi tidak berhasil karena memang mungkin birokrasinya belum menginginkan untuk hal tersebut. Nah, saya berharap Pak *platform* dengan *situation room* yang keren itu itu *developer*-nya semuanya dikelola oleh kementerian, *server*-nya berada di kementerian bukan berada di tempat lainnya. Saya berharap kementerian lain bisa mencontoh mempunyai platform yang keren seperti itu.

Terima kasih Pimpinan.

*Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thariq.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Pak Ananto. Pak Khilmi dulu ya?

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H.):

Terima kasih.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Iya ya saya dulu Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Khilmi dulu atau Pak Ananto itu?

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Khilmi dulu.

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H.):

Ya, saya sebentar Pak. Oke, *please* silakan, silakan.

F-P.GERINDRA (KHILMI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Ketua.

**Yang saya hormati Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Menteri BUMN dan Wakil Menteri BUMN I dan II,
Yang saya hormati Menteri Investasi beserta jajarannya.**

Saya singkat aja Pak. Terima kasih atas percepatan dari Kementerian Investasi dalam perizinan-perizinan yang saya udah mengalami sendiri untuk mengurus itu sangat cepat. Jadi, saya sangat mengapresiasi Kementerian Investasi.

Tapi saya mempertanyakan tentang di Kementerian BUMN ini karena banyak sekali BUMN-BUMN yang dimatikan. Jadi, tapi Kementerian BUMN ini tidak punya prediksi apa yang akan dilakukan, misalnya ini menteri apa dari Kementerian BUMN di bidang pangan. Semua yang akan dilakukan dari PTPN sampai Rajawali RNI itu mau kerjanya itu hampir bersamaan untuk bidang distribusi. Padahal, di sini kan Kementerian BUMN itu udah ada Bulog salah satunya sistem distribusi yang udah terbangun dari lama. Jadi, saya sangat menyayangkan cara-cara Kementerian BUMN ini dalam hal *roadmap* bidang pangan ini gitu loh, seharusnya kan kajian-kajian harus dibentuk dulu, dikaji dulu mana yang lebih baik apakah Bulog ini untuk mendistribusikan mendistribusikan barang ini udah tidak baik atau *nggak*.

Terus tentang mematikan BUMN. Harusnya di RNI ada Sang Hyang Seri, ada Pertani, ada Berdikari, tapi mana? Sang Hyang Seri itu perusahaan yang udah tidak bisa diselamatkan. Dulu kita pernah ngasih PMN dengan nilai yang lumayan besar, tapi kan hasilnya kan nol masih apa itu *minus* gitu loh Pak Menteri. Tapi kenapa yang dimatikan itu perusahaan yang agak bagus, yang agak bagus Berdikari apa Pertaninya yang dimatikan harus dikaji dulu mana yang lebih bagus yang perusahaannya akan dimatikan itu. Jadi, saya berharap Kementerian ini punya konsep bagaimana untuk menyelamatkan pangan dan pendistribusiannya jangan sampai tumpang tindih gitu.

Itu aja dari saya Pak Ketua. Mudah-mudahan Pak Menteri BUMN ini bisa mendengar dan bisa mengkaji benar baik buruknya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya Pak Ananto.

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H., M.H.):

Ya, *matur nuwun* Pak Aria Bimo, Pak Menteri BUMN.

Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja. Beberapa minggu yang lalu kami kunspek ke tol Serang-Panimbang. Nah, Serang-Panimbang ini ada 3 sesi dan sekarang baru selesai 1 sesi, tetapi dikawatirkan akan terjadi mangkrak atau lambat, saya tidak hanya ngomong mangkrak Pak tetapi lambat. Nah, karena pembangunan sesi kedua dan sesi ketiga saling terkait, sementara sesi kedua itu disampaikan dilaporkan bahwa ada kekurangan kira-kira Rp1,2 T.

Nah, ini cita-cita kita semua Pak kaitan dengan Banten karena ada keyakinan kalau Banten sejahtera republik ini sejahtera, itu sudah ditulis oleh Multatuli dalam Max Havelaar sehingga saya berharap Pak Menteri ini diberi katakana mendapatan perhatianlah karena HK, Waskita mendapatan PMN untuk mengerjakan tol. Nah, sekarang barangkali harus dipikirkan Wika karena kalau ini sampai mangkrak maka zona merah maksudnya kemiskinan di Banten itu tidak akan berubah, sementara ini luar biasa Pak Menteri memotong betul-betul dari 8 jam menjadi 2 jam dan pinggir-pinggir tol itu akan hidup.

Saya pikir itu Pak Menteri.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ananto sebagai pendalaman terakhir dari kawan-kawan Anggota Komisi VI, apakah masih ada? Saya kira cukup.

Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Menteri, sebelum Pak Menteri ke Pimpinan dulu Pak Martin.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Baik.
Terima kasih Mas Bimo.

Pertama saya mau ingatkan keputusan kesimpulan rapat kerja kita terkait dengan ini Pak Pak Menteri BUMN, dukungan kita terhadap ketersediaan rumah sakit, obat-obatan, vitamin dalam rangka pandemi Covid. Waktu itu kita sedang mendiskusikan sisa dana PEN yang kemudian ditambahkan, tapi memang pada waktu itu Pak Menteri mengatakan bahwa akan berdialog dengan Kementerian Keuangan.

Nah, kalau kita lihat dengan skema yang sekarang ini tidak ada ke sana bagaimana jalan keluarnya supaya kita juga menurut saya ya dengan pandemi sekarang ini kita juga tidak bisa terlalu percaya diri karena dari perkembangan yang ada di negara lain pun seperti di Singapura juga

sekarang naik, di berbagai negara juga naik. Nah, artinya kita tetap pada masa sekarang ketika pandemi Covid ini mungkin grafiknya turun, kita tetap harus menyiapkan diri juga kalau sampai terjadi gelombang yang berikutnya sampai memang pandemi ini selesai.

Nah, yang kedua Pak Menteri. Kemarin waktu kami rapat dengan IFG terkait dengan PMN Rp20 triliun yang juga sebagai salah satu skema penyelesaian masalah Jiwasraya laporan dari IFG itu sampai sekarang belum turun dananya sehingga banyak juga walaupun sudah negosiasi ya banyak juga nasabah yang melapor kepada kami. Memang mereka sudah sepakat sudah teken polis baru dan lain sebagainya, tapi belum mendapat manfaat katanya dananya belum turun. Nah, ini bagaimana nih kita rencana ke depan agar ini juga penyelesaian masalah Jiwasraya memperoleh kepastian bagi para nasabah.

Untuk Pak Menteri Investasi. Pak Menteri saya pernah mengatakan waktu itu terkait dengan memang peran Pak Menteri itu memudahkan ya memudahkan kemudahan berusaha dan investasi, tapi bagaimana juga pengawasan terhadap investasi-investasi yang sudah masuk dan bermasalah dengan masyarakat. Jadi, kita ini kan negara kita ini kan bukan hanya negara yang memudahkan orang berusaha yang itu kita setuju kita tidak bukan setuju, tapi ketika orang sudah berbisnis dan kemudian bermasalah dengan masyarakat. Pada waktu itu saya minta, apakah ada kewenangan satgas untuk kemudian mengecek ya status investasinya karena terjadi pelanggaran lingkungan, terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat adat ini terkait di dapil saya PT TPL misalnya. Apakah itu bisa Pak Menteri cek gitu ke lapangan agar Satgas Investasi ini tidak dituduh pro pengusaha semata, tapi juga menjaga kepentingan masyarakat dan hak-hak masyarakat yang tidak boleh dikorbankan dengan alasan untuk kemudahan berusaha atau berinvestasi.

Saya pikir itu saja Mas Bimo singkat padat.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan Pak Menteri untuk merespon beberapa hal yang terkait dengan khususnya materi rapat dari ini, yang kira-kira buanyak sekali pendalaman dari kawan-kawan tadi nanti bisa kita lanjutkan dalam rapat berikutnya dan bisa dijawab secara tertulis. Kami persilakan Pak.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR) :

Terima kasih Pimpinan.

Saya coba menjawab 6 poin besar nanti tentu yang belum terjawab kita buat secara tertulis. Saya rasa inisiasi dari Komisi VI yang mendorong mengenai rencana Undang-Undang BUMN adalah yang sangat tepat karena memang di situlah konteks daripada bagaimana kita terus memperbaiki daripada kinerja BUMN secara bersama-sama. Jadi, tidak menterinya sendiri, kementeriannya sendiri, tetapi bersama-sama dengan Komisi VI di mana

tentu dengan pengalaman daripada para Anggota Dewan di Komisi VI yang sudah cukup lama mendalami PMN inilah salah satu inisiasi atau *legacy* yang kita harapkan. Kenapa memang di situ jelas bahwa kompleksitas apakah yang kita bicarakan yang namanya PMN, utang, kepemilikan itu memang tidak lain justru di Undang-Undang BUMN yang ini harus diperbaiki.

Contohnya saja misalnya bagaimana tadi pertanyaan dari para Anggota Dewan, kok nutup saja lama sekali? Merestrukturisasi aja kita perlu waktu 9 bulan yang akhirnya tentu di era sekarang digitalisasi seperti ini yang di mana dinamika dalam berusaha itu terjadi percepatan yang luar biasa ketika kemarin perusahaan ini untung besok saja bisa rugi langsung karena ya digitalisasi ini sangat membuka pasar secara terbuka.

Nah, di situlah kenapa memang kita sangat mengharapkan sesuai dengan masukan dari para Anggota Komisi VI, Pimpinan bagaimana peran kami di Kementerian BUMN lebih ditingkatkan daripada kepercayaan kita mengelola secara bersama-sama. Ya tentu kalau kita lihat kalau bicara privatisasi itu sudah ada komitennya dan tentu kita tidak ambil perannya itu tetap di sana, lalu mengenai penyuntikan pun kita tidak ambil perannya. Tetapi dalam konteks kami diberi kesempatan bersama Komisi VI untuk bisa menutup ataupun merestrukturisasi toh kita bersama-sama yang mengawal ini yang saya rasa di rencana Undang-Undang BUMN itu perlu mendapat penekanan dan *power* lebih untuk kami melakukan tidak semata-mata untuk menambah kekuasaan, tetapi di sinilah justru yang ditekankan tadi tidak lain kami juga menjadi *pressure* yang baik untuk para direksi kami.

Tentu kalau kita lihat sekarang bagaimana juga dengan *track record* yang dulu-dulu ya, kita tidak bicara yang hari ini karena saya tidak mau suudzon untuk tadi menuduh para direksi kami yang sudah bekerja maksimal di saat Covid ini. Tentu bagaimana peran dari mereka sendiri yang terdahulu kan punya pemikiran bahwa toh kalau ada apa-apa dengan perusahaannya pasti ditolong negara.

Nah, kalau sekarang kita punya *power* untuk menutup ya tentu dengan paparan yang terbuka dengan Pimpinan Komisi VI para Anggota Dewan dan tentu para Anggota DPR yang hadir hari ini, ini menjadi kekuatan sendiri bahwa mereka kita rubah mentalitasnya bagaimana mereka punya pertanggungjawaban tidak hanya sekedar tadi pada saat menjabat, ini saya rasa konteks yang sangat kita harus lakukan. Jadi, kita sangat berterima kasih ketika rencana Undang-Undang BUMN ini dibuka dan itulah saya rasa salah satunya kita harapkan bagaimana peran kita bersama-sama bisa lebih.

Nah, tentu konteks lainnya di Undang-Undang BUMN sendiri tentu tadi bagaimana kita bisa memetakan secara baik PMN yang dibutuhkan atau dividen yang harus dilakukan memang sesuai dengan kinerja perusahaannya, tidak karena tadi Pak Darmadi bilang polesan-olesan buku yang akhirnya kadang-kadang menerbitkan surat utang dipakai juga untuk bonus dan tantiem. Kita di tahun pertama kita menemukan itu dan ini sesuatu yang menurut saya sangat tidak *ethical* dan tentu ini menjadi sebuah hal yang mestinya dihukum ya kembali ini yang kita harus jaga.

Kenapa memang sudah seyogyanya kita punya peta yang besar, tadi apakah PMN ini bisa diselesaikan jangka pendek, menengah, atau panjang? Bagaimana bukannya? Bagaimana *balanced*-nya? Dan ini yang kita harapkan juga, kenapa? Tadi, kalau memang ini PMN dilakukan itu secara berkala kita juga mengenal yang sistemnya *multiyears* karena kita mengolah tadi yang namanya dividen secara berkala juga. Tidak hanya tadi melakukan PMN karena harus dilakukan pada tahun itu tetapi tahun depannya tidak tahu gimana.

Nah, tentu PMN juga dengan Undang-Undang BUMN ini yang kita harapkan menjadi peta yang besar juga, kenapa? Bahwa PMN itu musti ada konteks yang jelas, kalau memang itu penugasan dari K/L tersebut ya kita kembali juga kita lihat kalau memang penugasan memang itu harus dilakukan tetapi secara tadi *bottom line* atau korporasinya tidak kuat memang ini harus jelas dananya, itulah yang kita namakan PMN yang diperlukan. Kalau kita lihat penugasan ini menguntungkan paling tidak nol saya rasa tentu banyak sekali penugasan yang sudah dilakukan oleh BUMN kita jalankan dengan seksama dengan tadi tanggung jawab yang baik. Jadi, saya rasa kunci daripada Undang-Undang BUMN ini menjadi penting karena turunannya di situ ada PMN dan juga kinerja dari perusahaan yang kita bisa lakukan apakah direstrukturasasi, di-*merger* atau diperkuat untuk menjadi *champion*.

Sama seperti tadi kalau kita lihat *list* daripada perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Global saya rasa sangat menurun dulu dan sekarang sekarang kita hanya punya empat, padahal *market* kita adalah salah satu yang terbesar di dunia. Kalau kita lihat peningkatan daripada G20 kita yang terus meningkat tapi jumlahnya BUMN terus menurun ini tidak menyambung konteksnya, *market*-nya besar sumber daya alam yang besar. Jadi, tentu ada pola-pola administrasi yang harus diperbaiki dan salah satunya ya di situ dan ini tentu kita tidak mau saling menyalahkan dengan kementerian lain karena tentu suksesnya kami juga ya karena dukungan dari kementerian lain.

Untuk mengenai hutang. Saya rasa ini sama juga ini semua kebanyakan hutang yang lama dan kita tentu saya berterima kasih dengan dukungan dari pada Komisi VI dan jajaran kita sekarang memastikan restrukturisasi hutang itu bukan sekedar restrukturisasi yang hanya *delay problem*. Tetapi contoh yang kita lakukan di PTPN di situ ada warnanya kuning, merah, hijau *step*-nya istilahnya di mana memang *step-step* yang harus dilakukan ketika PTPN punya utang Rp43 triliun dan ini merupakan penyakit lama yang kita sudah tahu ya dan ini suatu saya rasa korupsi yang terselubung yang memang harus dibuka dan harus dituntut yang melakukan ini. Di situlah kita lihat apa *step*-nya bahwa memang setelah di restrukturisasi PTPN harus melakukan efisiensi yang besar-besaran terhadap operasionalnya.

Lalu kedua *corporate action*, *corporate action* di situ adalah salah satu memang dituntut supaya ketika hutangnya diperpanjang tetap masih ada *cash* yang masuk ke bank-bank yang meminjam dari yang memberi pinjaman kepada PTPN dan ini bank-banknya ini bukan hanya Bank Himbara tapi

banyak bank asing banyak bank swasta yang hingga kalau tidak terbayarkan akan *kolaps* secara beruntun. Nah, di situlah kita berinisiasi tadi selain efisiensi peningkatan daripada produksinya ya kita memang salah satu diuntungkan dengan harga kelapa sawit yang sedang naik, tetapi kita kalau kita lihat lebih dalam memang apa yang dilakukan PTPN selain efisiensi memang terjadi peningkatan dari pada tingkat produksi yang di dalamnya selama ini belum maksimal dan kalau kita *benchmarking* kelapa sawit BUMN sekarang dengan swasta lumayan tidak jauh seperti zaman dulu, nah di situlah terjadi peningkatan *revenue* sebanyak 37%.

Jadi, *focusing* daripada produk yang ada di PN ini menjadi kunci karena juga banyak produk-produk PTPN seperti yang kemarin saya lihat di Banyuwangi seperti coklat ya memang ya tidak punya nilai kekuatan untuk bermain di global ataupun di pasar lokal, jadi *effort* yang diberikan untuk benar-benar menjaga coklat kita dibandingkan kelapa sawit ini jauh *impact*-nya. Nah, karena itu kemarin salah satunya konsolidasi kelapa sawit ini yang kita harapkan menjadi *corporate* aksi yang akan datang sebisa juga strukturisasi daripada hutang ini bisa dibayarkan atau yang memang inisiasi yang memang sudah dirapatkan terbuka di seluruh kementerian itu Pak Menko hadir Pak Menkeu hadir, Menteri Perdagangan hadir, Menteri Pertanian hadir jadi kita sangat transparan mengenai pembentukan SugarCo. Memang keputusan rapat jelas kita harus mayoritas kita harus memproteksi daripada tadi bagaimana *equilibrium* persaingan daripada gula-gula di Indonesia yang selama ini kita masih terus impor, tetapi di situ *roadmap*-nya jelas bagaimana PTPN setelah mengkonsolidasi kita juga melihat dari tadi dananya yang baru masuk itu mana pabrik-pabrik yang bisa *sustain* dan mana yang harus ditutup.

Nah, contoh yang kemarin yang di Banyuwangi itu Glenmore itu tadinya rendemennya itu cuman 4 sampai 5,5% dengan perubahan direksi yang baru *alhamdulillah* kemarin rendemennya sudah 8%. Tetapi kan di situ kita tidak bisa memonopoli seluruh lahan jadi punya BUMN, di situ juga ada petani tebu yang kalau kita lihat kualitas daripada tentu bibitnya itu sangat dalam kualitas yang kurang bagus, karena itu kemarin kita lihat bagaimana justru petani itu harus dilibatkan dengan BUMN-nya. Nah, karena itu kemarin kita berkomitmen memberikan bibit unggul kepada petani secara gratis dan tentunya yang diuntungkan kita juga karena jualnya ke kita dan kita proses lalu menjadi gula yang tentu baik kualitasnya.

Sama juga di Krakatau Steel sama ya itu restrukturisasi ada *step 1*, *step 2* salah satunya konsolidasi di anak perusahaan bagaimana kawasan daripada Industri Krakatau Steel itu bisa sehat dan bisa *go public*-kan.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Izin Pimpinan. Interaktif sedikit Pimpinan. Izin Pimpinan.

Pak Erick tadi sebelum ke Krakatau Steel tadi PTPN. Saya harapkan Pak Erick untuk PTPN *holding* dan revitalisasi tadi sebelumnya sudah dapat PMN, mungkin Pak Erick harus kroscek lagi ya. Kayak di Banyuwangi oke dia

itu adalah pabrik baru ya dengan lahan yang baru diusahakan, makanya tadi alasan untuk produksi tidak bisa maksimal karena itu pabrik baru Pak ya kan bukan hanya karena direksi baru jadi bisa merendem bisa naik ya kan memang lahannya juga kurang Pak.

Yang kedua pabrik-pabrik yang sudah ada ini direvitalisasi dikroscek PMN, KSO-KSO dikroscek. Banyak sekarang revitalisasi yang dilakukan di PTPN itu tidak selesai Pak sampai hari ini malah masih bermasalah ada yang ke kejaksan dan lain-lain itu perlu dikroscek Pak.

Nah, ketiga pembangunan revitalisasi PMN dan lain-lain kalau bisa diusahakan bukan membuka lahan baru pabrik baru Pak, tapi pabrik yang sudah ada, lahan yang sudah ada, komunitas yang sudah ada, lahan yang sudah ada ini yang harus dikembangkan Pak itu yang kita harapkan Pak ya kan. Nah, itu supaya bisa lebih maksimal ya kan. Kalau IGG kan karena pabrik baru di sana Pak lahan baru pabrik baru, akhirnya apa? mengurangi pabrik yang sudah ada di wilayah PTPN yang lain Pak ya kan, pabriknya tambah banyak lahannya sekarang semakin menipis Pak. Nah, itu itu yang harus dipikirkan. Lalu bagaimana BUMN bekerja sama dengan pemkab dan lain-lain untuk bersinergi mengembangkan lahan itu pernah kita adakan MoU dulu, kami dulu di Komisi VI juga melakukan itu Pak untuk memediasi dan semuanya, nah itu yang harus dikroscek Pak. Sampai sekarang tuh PTPN masih revitalisasinya belum beres Pak. Nah, itu yang terpenting nanti Pak Erick tolong dimonitor semua.

Terima kasih.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Terima kasih Pak Nasim, memang.

F-PAN (Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.):

Izin Ketua, izin Ketua. Saya pendalaman PTPN menyambung Pak Nasim Khan.

Pak Erick apa namanya kalau bicara kinerja semester 1-2021 PTPN itu kan kemarin paparannya bagus, produksi gula dan sebagainya, tapi tebunya ada, gulanya tidak ada. Kemudian CPO, CPO juga di sini 1,27 juta ton tapi kemudian kenapa lari malah ke minyak goreng artinya ke ritel dan sebagainya. Lalu berapa sih sebetulnya nilai *appraisal* untuk pabrik-pabrik tersebut karena sampai melepas divestasi 49%.

Terima kasih.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Ya. Saya rasa kembali untuk yang PTPN kalau kita bicara konteks PMN yang sebelumnya itu tidak semua dipergunakan. Nah, itu yang memang ketika kita masuk waktu itu kami melihat ini kenapa konteksnya sudah ada

PMN tidak diselesaikan. Dan memang kalau kita lihat di PMN yang di tahun 2016 kalau tidak salah 16-17 itu memang tidak maksimal strategi besarnya, makanya ketika direksi yang baru kita pastikan kita meminta tadi rencana besarnya ini apa tidak hanya melihat tadi individu pabriknya saja tetapi secara besar ekosistemnya termasuk jumlah lahannya.

Nah, karena itu jumlah lahan kemarin kita bicarakan tidak hanya yang dimiliki PTPN cocok sekali apa yang dimiliki pemda atau petani, tetapi konteks yang terberat itu kalau bibitnya pun tidak diberikan maka hasil daripada tebunya pun bukan sesuatu hasil yang baik. Nah, karena itu memang penggabungan antara hal yang kita dengan yang lainnya itu harus menjadi suatu solusi. Jadi, tidak hanya BUMN-nya saja.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Yang penting tolong Pak Erick jadi catatan untuk revitalisasi bangunan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar. Pak Nasim sebentar dulu Pak.

Tolong kita sepakati dulu untuk yang terkait dengan ini lebih pada RKAKL anggaran, kalau yang lainnya selama itu terkait *monggo*. Nanti kalau saya lepas semua nyerocos Pak.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Iya, siap siap salah Pimpinan.

RKAKL anggaran kita harapkan.

KETUA RAPAT:

Sampai malam Pak. Jadi Pak Nasim tolong Pak akurasi ini Pak.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Siap. Jadi, saya bahas RKAKL dulu Pak anggaran 2022. PMN diharapkan khususnya kepada *holding* PTPN dan lain-lain bisa kepada revitalisasi yang sudah ada milik BUMN bukan membuka lahan baru dan lain-lain.

KETUA RAPAT:

Udah tadi udah ditanyakan itu Pak, jangan diulang lagi. Silakan Pak Menteri.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Nanti yang Bu Intan mungkin pendalamannya kita FGD-kan supaya lebih dalam.

Lalu, tadi mengenai TKDN saya tambahkan. Saya rasa ini memang sebuah kesepakatan di mana kita harus punya TKDN karena itu kemarin kita merubah strategi ya di perusahaan Surveyor, kami yang tadinya juga tumpang tindih antara Sucofindo dan Surveyor sekarang kita pisahkan bagaimana Surveyor ini menjadi Lembaga Survey yang benar-benar menerapkan TKDN kepada kita, jadi keberpihakan. Untuk Sucofindo sendiri kita refokuskan kepada *illegal mining*, jadi kasus-kasus seperti tahun 2018 kalau tidak salah yang di mana justru Sucofindo dan Surveyor bersaing akhirnya main cap-cap aja produksi waktu itu Nikel atau apa yang mestinya tidak boleh diekspor mereka mencap akhirnya diekspor dan itu menjadi kasus temuan. Nah, di situlah kita pisahkan supaya mereka benar-benar terpisah dan mendukung sesuai dengan sinerginya atau tupoksinya yang sudah disepakati daripada konsolidasi itu.

Dan tentu tadi tentu amanahnya kita jaga ya mengenai asing dan lokal ataupun BUMN, ya saya rasa kita punyalah bendera Merah-Putih sama-sama karena itu kita tekankan kemarin contoh apa yang kita lakukan kita ingin juga meningkatkan kinerja BUMN ini bisa bersaing. Dan tentu ini yang tentu menjadi catatan kalau kita lihat sampai tahun 2023-2024 memang itu deviden berdasarkan dari 11 BUMN saja, sedangkan total BUMN setelah dikonsolidasikan 41. Nah, tentu kita tidak menutup mata yang 30 itu juga tidak kita paksakan untuk deviden kalau memang pelayanan servisnya memang sangat besar. Contoh seperti misalnya KAI, KAI sendiri ya memang dengan kondisi hari ini ya sulit untuk diberikan deviden, tetapi kita juga tidak memaksakan beberapa BUMN lain yang memang sangat dekat dengan *public service* ya tidak deviden tetapi tentu BUMN yang memang sangat korporasi kita harapkan peningkatan deviden.

Nah, ini juga menjawab tadi bahwa memang kan skenario awal itu sebelum Covid kita targetnya Rp43 triliun dan akhirnya karena Covid itu 90% terimbas dan akhirnya hanya 10%. Nah, kita lihat kemarin terima kasih dukungan dari Komisi VI kita ada *readjustment* makanya devidennya 26. Di tahun ini kita waktu itu 33 tapi dari Komisi VI meminta meningkatkan angkanya waktu itu ke 35 dan terakhir ke 37, 36,4 kalau *nggak* salah terakhir dan itu kita coba lakukan. Memang *statement* saya waktu itu justru ya tadi saya juga ketik di mediana untuk tahun depannya bahwa deviden yang kita diharapkan di tahun depan yang hari ini 36 kita usahakan balik pada saat sebelum Covid yang waktu itu kalau tidak salah Rp43 triliun. Nah, memang targetnya di atas 40.

Nah, cuman kembali berikan waktu kita untuk *adjust* karena kemarin sendiri kita juga sudah kumpulkan 108 direksi yang ada di BUMN kita memberi arahan langsung bagaimana tadi kepastian daripada deviden, PMN ini harus punya jangka panjang tidak setiap tahun, tidak tiba-tiba minta mendadak. Nah, itu yang kita lakukan juga untuk tadi TKDN dan deviden.

Dan tentu saya rasa mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja kita sepakat bahwa memang dengan Covid ini dengan digitalisasi ini menjadi tantangan tersendiri *me-manage* tenaga kerja kita. Tetapi tentu bukan alasan lah kalau kita sendiri ketika memang sudah ada perusahaan yang sudah tidak operasi dari tahun 2008 didiamkan, ya memang mesti ada solusi ya perusahaan itu ditutup, pegawainya diberikan kompensasi yang baik, dan tentu bagaimana kepanjangan dari pada setelah *pasca* Covid nah efisiensi akan terus terjadi.

Karena itu kita kemarin di BUMN merubah strategi mengenai ketenagaan kerja selain tadi saya tambahkan mengenai talenta yang di dalam kita sepakat ya bahwa tentu Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga kan memberi batasan kepada kita, kita diberikan pemikiran, karya yang baik, tetapi umur tidak. Nah, karena itu memang kenapa *continuity sustainability* daripada ketenagakerjaan ini menjadi kunci karena itu kita kemarin mendorong forum *human capital* bersama BUMN bisa bersinergi membikin tadi rencana besar daripada perlukah tenaga kerja baik dari luar negeri ataupun dari dalam tanpa meninggalkan potensi-potensi talenta dari BUMN seperti yang di BRI, BRI sekarang dua direksinya usianya di bawah 42 satu dan 41 tahun itu dua-duanya dari dalam, jadi tidak dari luar. Memang ada beberapa yang kita tarik dari luar seperti contoh Soleh Ayubi di Bio Farma yang kemarin dari *United Healthcare* kita tarik, tapi tentu bagaimana kita pastikan juga tadi talenta yang ada di BUMN juga kita *upgrade* selain yang dari luar.

Nah, tentu untuk tenaga kerja juga ya kita rencana program-program BUMN ini yang bisa berdampak untuk pembukaan lapangan kerja. Contoh salah satunya bagaimana misalnya program Mekaar yang sudah diluncurkan Bapak Presiden dari tahun 2014 waktu itu 15 di mana awalnya itu kan 5,8 juta. Nah, tentu dengan perbaikan sistem dengan juga *upgrading* di sana-sini satu setengah tahun terakhir sekarang itu Mekaar nambah 5,2 juta. Jadi, yang tadinya 5,8 juta 3 tahun sekarang satu setengah dalam waktu 1,5 tahun menjadi tambahan 5,2 jadi totalnya 10,8. Nah, kalau ini tadi program-program BUMN yang juga didukung oleh Komisi VI menjadi juga pembukaan lapangan kerja itu sudah membuka 5,2 juta lapangan pekerjaan baru untuk satu ibu-ibu, satu ibu satu ini.

Sama juga program Pertashop yang ada di Pertamina. Kenapa kita dorong menjadi 10.000 Pertashop, karena kalau satu Pertashop juga tadi memperkerjakan 6 itu ada tambahan 60.000. Jadi, memang BUMN-nya harus mengerem karena tadi daripada kompetisi yang terjadi hari ini tetapi justru memastikan program kerjanya justru membuka lapangan kerja lebih efisien.

Dan saya tentu nanti mengundang daripada Komisi VI karena ini PPKM sudah mulai longgar ya karena kemarin ada keterbatasan, seperti yang pernah kita lakukan dulu di Bali ketika paparan utama mengenai Benoa di mana kita paparkan kepada Komisi VI kita undang menteri-menteri terkait sehingga tadi program ini terbuka. Dan kita nanti ada inisiasi rencana di bulan Oktober pertengahan dimana kita nanti ada peresmian daripada pelabuhan baru di Labuan Bajo itu kan ada pelabuhan yang ini nanti kita juga undang Komisi VI secara bersama-sama, di saat itu juga kita kumpulin direksi. Mungkin saat itu yang tepat juga mungkin kita coba fokuskan beberapa

program yang kita mau bahas secara mendalam nanti di tempat-tempat tertentu.

Mungkin itu, yang lainnya saya akan jawab tertulis, Mohon maaf kalau ada kekurangan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri.
Selanjutnya Pak Menteri Investasi.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Terima kasih Pimpinan.

Izin Pimpinan, saya hampir sama dengan Menteri BUMN yang mohon maaf nantinya kami tidak akan jawab satu persatu secara garis besar saja beberapa poin, yang selanjutnya akan nanti di dilakukan lewat jawaban tertulis.

Yang pertama menyangkut dengan realisasi investasi dan kolaborasi. Saya minta di ada ada ininya. Pimpinan kami sampai dengan kuartal pertama semester satu realisasi investasi kita itu sudah mencapai 49,2% ini 49,2%. Kemudian *foreign direct investment* itu 51,6. Investasi kita antara Jawa, Luar Jawa itu berimbang. Tenaga kerjanya seperti ini, karena tadi yang ditanyakan adalah berapa realisasi investasi kita dari PMA PMDN. Ini sampai dengan semester 1.

Yang kedua Pimpinan, kolaborasi. Jadi, kita tidak pernah mau meninggalkan ketika ada investasi masuk ke daerah maka pasti dia harus berkolaborasi sama orang daerah, ini adalah amanah dari Pasal 90 Undang-Undang Cipta Kerja terutama UMKM. Dan sudah saatnya kita semua dalam ruangan ini hadir untuk harus ada keberpihakan untuk orang daerah, jangan lagi ekonomi ini hanya dikuasai oleh segelintir orang dan atau hanya di Jakarta saja, tetapi proses bisnisnya itu ada pada daerah-daerah.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin Pimpinan.

Mungkin perbaikan data aja Pak Menteri karena data yang saya punya itu baru 9% UMKM kita yang bekerja sama dengan apa namanya perusahaan-perusahaan besar itu, ini datanya gimana yang ada?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Sebentar, data dari mana ini Pak? Maksudnya saya belum kasih ke luar data berapa persen. Oh.

KETUA RAPAT:

Ya, lanjutkan dulu Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Kita belum sampai soalnya Pak Deddy. Saya heran Pak Deddy ini bingung juga saya Pak, saya belum munculkan data Pak Deddy punya data duluan, bingung saya jadinya. Saya jadinya ingat Pak Andre begitu Pak Deddy.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Saya disinggung-singgung jangan lupa dijawab saya nanti.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Sorry Pimpinan, inilah kalau kita berkawannya sudah lama begini Pimpinan.

Jadi Pimpinan, terkait dengan kolaborasi Pak Deddy saya akan meminta nanti Pak Yuliot tidak di forum ini untuk akan menerima Pak Deddy khusus untuk menjelaskan mana-mana saja yang sudah bekerja supaya lebih paten lagi. Nah, termasuk nanti Kaltara begitu investasi masuk di sana Pak Deddy maka saya pastikan untuk harus ada kolaborasi sama orang Kaltara, yang ada di Kaltara jangan orang Kaltara yang di Jakarta udah jadi konglomerat itu namanya tidak ada perpindahan.

Yang kedua Pimpinan menyangkut OSS. OSS ini, Pak Mufti ada ya Pak Mufti, menyangkut dengan kewenangan daerah izin lokasi itu ada di daerah cuman tata ruangnya itu yang akan dipetakan langsung supaya bisa dimasukkan dalam sistem OSS.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Pak Menteri.

Bahas yang di anggaran saja Pak, jangan bahas yang macam-macam Pak ya karena Pimpinan tadi bilang ini RKA K/L Anggaran. Tolong dibahas anggaran Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Betul, betul Pak, betul itu.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Kalau *ndak* saya nanti marah Pak. Tolong ya hargai.

KETUA RAPAT:

Saya kira nanti ada waktu khusus untuk membahas yang lain Pak. Waktunya ini mepet Pak, jam 2 kita rapat lagi Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Soalnya pertanyaannya langsung ke OSS soalnya. Tapi kalau memang anggaran kan *nggak* ada lagi Pimpinan yang harus dibahas.

KETUA RAPAT:

Saya kira cukup saja.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Saya pikir cukup Pimpinan ya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Ya. Saya pikir menyangkut Pak Andre Pimpinan, biar dia tidak kecewa. Pak Andre, tim audit lagi berjalan saya udah *commit* Pak Andre di dalam forum yang terhormat ini rapat kita beberapa minggu yang lalu. Pak Andre kan tahu saya ketika saya memimpin LIPI kan? Mana pernah ketika saya memutuskan sesuatu terus saya tarik keputusan saya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kira-kira berapa lama audit Pak?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Saya pikir, tunggu saya bicara dulu Pak Andre. Jadi urusan investigasi ini sedang kita membentuk tim, melibatkan BPKP, dan yakinlah bahwa saya tidak mungkin mau untuk membiarkan pengusaha nasional kita itu dipenetrasi oleh luar. Tapi mereka juga jangan berkedok terlalu di belakang kita ini Pak Andre, ini kan teman-teman kita semua Pak Andre. Saya tahu ini modusnya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Modusnya seperti apa Pak, coba dibongkar aja.

KETUA RAPAT:

Saya kira cukup Pak, nanti kita berikan ruang tersendiri Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Nanti kita internal aja.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jangan kita bangun opini modus-modus tapi *nggak* diungkap.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Jadi nanti tunggu hasil.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oke.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Nanti kalau sudah audit baru saya presentasi di sini.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Berapa lama kira-kira auditnya?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Tunggu BPKP. Jadi, kalau saya yang membuat timnya langsung, maka saya jawab hari ini. Tapi, karena timnya ini tim gabungan, maka saya tidak bisa menjawab hari ini. Dan di kesimpulan rapat kita terdahulu tidak juga saya berbicara tentang berapa lama. Jadi, kita harus konsisten juga Pak Andre.

Saya pikir itu Pimpinan.
Terima kasih.
kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, dan

Salam sejahtera untuk kita semua.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Wa'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Ibu Anggota Komisi VI dan juga terima kasih kepada kawan-kawan dari terima kasih Saudara Menteri BUMN dan Menteri Investasi yang telah memberikan jawaban dalam respon kawan-kawan Anggota Komisi VI.

Sebelum saya menyampaikan kesimpulan rapat yang tadi disepakati akan ada jawaban tertulis, kami persilahkan sekretariat untuk menampilkan beberapa pertanyaan atau pendalaman. Dari Pak Martin Manurung ada 3, dari Gde Sumarjaya Linggih ada 2, dari Pak Deddy Sitorus ada 7. Kemudian dari Pak Andre Rosiade ada 6, dan dari Pak subardi ada 1, dari Pak Nasim ada 4, dari Ibu Melani ada 4, 6. Kemudian dari Pak Amin ada 6, dari Pak Jon Erizal ada 3, dari Pak Mufti Anam ada 5, 6, dari Ibu Nevi ada 3, dari Pak Darmadi ada 3, Pak La Tinro ada 3, Pak Tommy ada 5.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Pimpinan saya mau ini nih yang pertanyaan tertulis karena saya menerima jawaban tertulis saya tidak memaksa jawaban saya harus di sini. Coba ditampilin tadi itu, itu pertanyaan anggota.

Yang dari saya, coba ke atas. Itu saya tadi saya ada contoh kasus contoh kasusnya itu di dapil saya PT TPL, tolong ditulis supaya nanti jawabannya jangan general. Nomor 3, nomor 3.

KETUA RAPAT:

Nomor 3. Investasi.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Nggak apa-apa jawab tertulis aja.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Pimpinan. Izin Pimpinan mohon maaf.

Pak Imam nanti kalau PT yang itu dari Pak Pimpinan punya kebetulan untuk pengawasan itu ada di Deputy Pengendalian, saya langsung kita putuskan aja di sini. Nanti In Syaa Allah awal bulan Oktober nanti Pak Imam dengan tim dari Kementerian Investasi turun langsung ke lokasi Pak Ketua supaya bisa *clear* barang itu.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Siap. Tapi ditulis aja secara khusus contohnya TPL, supaya nanti jawaban tertulisnya juga konteks yang sama.

KETUA RAPAT:

Teman-teman saya kira *draft* kesimpulan rapat kerja hari ini mengacu pada agenda rapat kerja hari ini yang mana kita membicarakan RKA K/L Tahun 2022 PMN 2022. Kemudian dari Kementerian Investasi menyesuaikan RKA K/L Tahun Anggaran 2022 dan kesiapan Menteri Investasi/BKPM menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Draft Rapat Kerja atau Draft Kesimpulan Rapat Komisi VI dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi terkait penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2022 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran Rabu 22 September adalah sebagai berikut:

I. Kementerian BUMN.

1. Komisi VI DPRRI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp208.245.675.000,- yang dialokasikan dalam:
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp75.117.609.000,-.
 - b. Belanja barang sebesar, belanja barang sebesar Rp131.983.066.000,-.
 - c. Belanja modal sebesar Rp1.085.000.000,-.

Saya setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPRRI menyetujui terkait tambahan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan KMK Nomor 298 Tahun 2021 sebesar Rp16.900.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutama Karya sebesar Rp9.000.000.000.000,- yang akan digunakan untuk tambahan dukungan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
 - b. Waskita Karya sebesar Rp7.900.000.000.000,- yang akan digunakan sebagai penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi serta digunakan untuk modal kerja dan investasi jalan tol.

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

3. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan Menteri BUMNRI terkait Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Pimpinan.

Tadi yang HK ada tulisan Jalan Tol Sumatera *nggak*? Supaya, ada ya?
Oke.

KETUA RAPAT:

Trans Sumatera, ada.

3. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan Menteri BUMN terkait Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perum Perumnas yang akan digunakan dalam upaya memperbaiki struktur permodalan untuk melanjutkan program pengadaan “Satu Juta Rumah” bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sebesar Rp1.570.000.000.000,-.
 - b. PT PLN (Persero) yang akan digunakan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa sebesar Rp5.000.000.000.000,-.
 - c. PT Utama Karya yang akan digunakan dalam penyelesaian konstruksi 8 ruas Tol Trans Sumatera dengan target tambahan panjang 162 KM sebesar Rp23.850.000.000.000,-.
 - d. PT Waskita Karya Tbk, yang akan digunakan dalam penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi sebesar Rp3.000.000.000.000,-.
 - e. PT Adhi Karya Tbk, yang akan digunakan dalam penyelesaian pembangunan Jalan Tol Solo-Yogja-Kulon Progo dan Yogyakarta-Bawen serta SPAM Regional Karian-Serpong sebesar Rp1.980.000.000.000,-.

Apakah ada masih F itu? ini semua sudah kita dalam juga di dalam RDPU-RDPU yang tentunya tidak terlepas dari keputusan rapat hari ini. Bisa disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

5. Kementerian Investasi.
 4. Komisi VI DPRRI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi DPRRI yang pada hari ini disampaikan yang tentunya jawaban-jawaban itu merupakan suatu argumentasi-argumentasi di dalam memberikan persetujuan RKA K/L hari ini sebagian dan sebagian juga merupakan pendalaman-pendalaman hal yang diinginkan anggota Komisi VI dalam rangka fungsi pengawasannya.
- II. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
1. Komisi VI DPRRI menyetujui alokasi anggaran BSN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp711.500.000.000 yang dialokasikan dalam 2 program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp300.901.232.000,-.
 - b. Program Penanaman Modal sebesar Rp410.612.314.000,-.

Setuju, Pak Menteri?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Pimpinan.

Angka besarnya udah paten cuman angka ujungnya aja yang agak harus nambah itu, jadi *tujuh satu satu lima satu tiga lima satu tiga lima empat enam*.

KETUA RAPAT:

Lima empat enam.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Ya. Yes, paten barang itu.

KETUA RAPAT:

Kalau rincian a, b-nya sudah cocok ya?

(RAPAT:SETUJU)

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Oh BSN, kok ada BSN di situ Pimpinan?

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Salah ketik itu.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Atau sudah digabung BSN dengan Kementerian Investasi?

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Kesimpulan kemarin itu, kesimpulan kemarin. Ini TA udah pada laper juga kali nih.

KETUA RAPAT:

Kok jadi BSN.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Kemarin itu kesimpulannya *copy paste* kali itu.

KETUA RAPAT:

Cukup. Saya ulangi. Angkanya udah betul belum tuh?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Udah udah, udah paten.

KETUA RAPAT:

Oke.

1. Komisi VI DPRRI menyetujui penyesuaian Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp711.513.546.000,- yang dialokasikan dalam 2 program sebagai berikut.

Tadi sudah saya uraikan ya nggak ada perubahan ya? a, b-nya ya setuju.

(RAPAT:SETUJU)

Kemudian OSS masuk dalam rapat hari ini karena tersebut dalam dalam agenda hari ini.

2. Komisi VI DPRRI mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk mengimplementasikan OSS Berbasis Risiko secara efektif, melakukan pengawasan dengan ketat dan melakukan penyempurnaan sistem OSS sehingga implementasi OSS Berbasis Risiko dapat meningkatkan iklim berinvestasi di Indonesia secara berkualitas.

Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Apakah masih ada?

3. Komisi VI DPRRI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPRRI. Dengan berbagai hal terkait dengan anggaran maupun beberapa hal terkait dengan fungsi pengawasan kawan-kawan Anggota Komisi VI kepada Kementerian Investasi.

Ada Pak Menteri?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Pimpinan.

Kalau boleh tolong masukkan satu poin bahwa kami mengajukan usulan anggaran tambahan Rp600.000.000.000,- karena itu belum masuk. Karena.

Pimpinan. Biar dimasukkan aja saran saya tentang bagaimana caranya, bersama-sama anggota dan saya yang akan mengurusnya, yang penting itu dimasukkan dalam rapat ini.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):

Kita tahu, Pak Menteri agak lihai, jadi.

KETUA RAPAT:

Sebagai catatan saja ya.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):

Sebagai catatan.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Makanya Kementerian BUMN minta 10% karena saya dengar itu.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Tapi Pimpinan kalau bisa jangan lagi ada rapat, rapat ini sudah terakhir ini.

KETUA RAPAT:

Oke. Sebagai catatan ada permintaan penambahan sebesar Rp600.000.000.000,- ya.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Oh gini, gini aja Mas Bimo.

Ini kan memang dipaparkan oleh Pak Menteri, jadi kita bilanginya bahwa kita menerima penjelasan atas usulan tambahan anggaran. Kalau itu betul.

KETUA RAPAT:

Kalau itu masih bisa di kesimpulan.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Ya gitu aja. Di kesimpulan, bahwa kita menerima penjelasan atas usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi.

Komisi VI menerima penjelasan Kementerian Investasi. Menerima penjelasan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Pimpinan. Pimpinan.

Boleh *nggak* Pimpinan saya membuat masukkan redaksi?

KETUA RAPAT:

Boleh boleh ajalah Pak, mau apa lagi.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Komisi VI mendapat penjelasan terhadap pengusulan anggaran Rp600.000.000.000,- dalam rangka meningkatkan realisasi investasi sebesar Rp1.200.000.000.000.000,- iya kan?

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Iya udah, boleh.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Jadi dan bila perlu ada kata-kata persetujuan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Perlu?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Itu lebih paten Pimpinan, karena isinya barangnya udah mau ada ini Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Kalau menerima penjelasan Pimpinan tidak setuju, bahas lagi rapat kita Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nggak, saya kaitannya dengan pembahasan di anggaran masih dimungkinkan *nggak*? Kan itu mekanisme ini karena ini harusnya rapat yang awal.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Pimpinan.

Menyangkut cara biar kita nanti main rapat-rapat internal dalam konteks kenegaraan yang penting ini harus disama pikirannya dulu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya kira yang paling realistis dan paling pas adalah kita menerima penjelasan itu yang implisit adalah menyetujui.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Paten.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin Pimpinan.

Kalau hanya menerima penjelasan kan bukan kesimpulan. Kalau Komisi VI menerima penjelasan dan memahami kebutuhan tambahan anggaran, saya kira bisa.

KETUA RAPAT:

Saya kira tepat.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Nah itu bisa, memahami.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Baru tahu saya Pimpinan ilmu lamanya keluar juga senior saya ini.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Tapi, tapi saya belum memahami.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Begitu kebalik itu. Komisi VI DPRRI.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Tolong yang paham itu diurus diurus segera itu supaya paham.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Memahami dan menerima penjelasan.

KETUA RAPAT:

Sudah, kali ini gimana Pak Andre.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nggak, mas Deddy aja, tambahan Pak Deddy udah pas itu.

KETUA RAPAT:

Saya kira memahami dan menerima penjelasan terakhir apa Pak Deddy?

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Nggak, abis itu katanya *nggak* cocok Pak. Menerima penjelasan dan memahami menteri.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Biasanya itu hanya.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Kalau kita, kalau penjelasannya kita bikin di belakang menerima dan memahami penjelasan, kita menerima apaan?

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Nggak, biasanya kan hanya satu, memahami atau.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Atau menerima penjelasan dan memahami usulan.

KETUA RAPAT:

Tepat itu. Menerima penjelasan dan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Pimpinan. Mohon maaf.

Waktu kita rapat sebelumnya saya kan sudah kami sudah memaparkan 600 ini dan dalam kesimpulan rapat terdahulu adalah menyetujui untuk diperjuangkan. Di rapat kita terdahulu Komisi VI dalam kesimpulannya adalah disetujui untuk diperjuangkan penambahan anggaran Rp600 miliar, pada saat itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Betul.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Jadi, kalau seperti ini lagi berarti dia menurunkan kelas lagi Pimpinan bukan menaikkan kelas itu redaksinya. Kembali kepada pada saat rapat kita di awal aja itu, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Coba liat kesimpulan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kalau mau kalau mau menyetujui bisa ditaruh menyetujui upaya dari untuk mendapatkan tambahan.

KETUA RAPAT:

Nggak, kalau waktu itu *timing*-nya masih tepat waktu itu karena kemudian kan dibawa ke sana.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Ini kan belum ketuk kan Pimpinan kan? Belum kan?

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Tapi, ini memahami agak berat kata-katanya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jadi maksudnya Pak Bahlil itu selain Al-Quran dan Sunnah itu bisa dirubah sebelum ketok.

KETUA RAPAT:

Kalau memang sudah menyetujui hanya mempertegas kembali.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Iya mempertegas.

KETUA RAPAT:

Mempertegas keputusan sebelumnya. Ada *nggak*?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Saya masih ingat soalnya Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Coba di-copy paste kalau ada, nanti tambahin kalimatnya.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Menyetujui usulan itu *nggak* apa-apa kok.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Waktu ini, ayo.

KETUA RAPAT:

Belum bisa dibuka? Udah. Coba buka lagi.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Pimpinan. Pimpinan.

Saran saya menerima dan menyetujui aja Pimpinan, menerima dan menyetujui.

KETUA RAPAT:

Sebentar ini ini ini, 600 yang 600. Ya itu 600 itu.

Yang kesimpulan yang dulu. Komisi VI DPRRI menyetujui pengajuan penambahan Pagu Anggaran Kementerian Investasi BKPM Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM yang nomor bla bla bla kepada Menteri Keuangan sebesar 600 ini sudah menyetujui kok, oke.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Kalau sudah ada di sini kan ini sudah ada.

KETUA RAPAT:

Sudah cukup, ya. Tolong dikembalikan.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Menyetujui sudah kita.

KETUA RAPAT:

Sudah.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Ya, ini aja *copy paste*.

KETUA RAPAT:

Copy paste dulu.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Bahwa kita tetap pada kesimpulan rapat yang lalu.

KETUA RAPAT:

Menegaskan kembali.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Nggak, perlu ditambah *nggak* Rp800 M?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Kalau kalau Pak Prof tahu cara lobinya oke juga coba Prof.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Presidennya orang kita.

KETUA RAPAT:

2. Komisi VI menyetujui penjelasan dan penambahan usulan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM terhadap tambahan anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp600.000.000.000,-

(RAPAT:SETUJU)

3. Komisi VI DPRRI mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk mengimplementasikan OSS berbasis risiko secara efektif, melakukan pengawasan dengan ketat dan melakukan penyempurnaan sistem OSS.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Ditambah target investasi Rp1.200.000.000.000.000,- nya juga dimasukkan.

KETUA RAPAT:

Capaian targetnya disampaikan *nggak*?

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Ya yang Rp1200 triliun itu.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Apa Pak Menteri, apa. Sebesar ini untuk mencapai target investasi sebesar Rp1.200.000.000.000.000,-. Terhadap tambahan doang. Untuk mencapai target investasi sebesar Rp1.200.000.000.000.000,-.

KETUA RAPAT:

Ya.

2. Komisi VI menyetujui pengajuan penambahan anggaran dari Menteri Investasi/Kepala BKPM terhadap tambahan anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp600.000.000.000,- untuk mencapai target investasi sebesar Rp1.200.000.000.000.000,-.

Ya setuju?

(RAPAT:SETUJU)

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Iya udah bener. Iya tambah lagi nol-nya kalau perlu bikin yang banyak nol-nya. Tambahin lagi nol-nya, yang banyak-banyak aja nol-nya *nggak* apa-apa.

KETUA RAPAT:

Sebentar sebentar kawan-kawan, seribu dua ratus triliun saya kira cukup.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Nol bikin 3 lagi. Itu ya? Coba ini BKPM biasanya pintar liat nol ini, benar ya? Udah bener tuh.

KETUA RAPAT:

Saya kira cukup. Kami persilakan kalau ada hal yang perlu ditambahkan Pak Menteri BUMN.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Izin Pimpinan.

Barusan diinfo hasil pertemuan Banggar dan Kemenkeu waktu itu kan Komisi VI juga mendorong beberapa perusahaan untuk dapat bantuan PMN. Waktu itu yang dipanggil BTN, BNI, terusnya *holding* parawisata *in journey*. Nah, sepertinya kemarin ini informasi yang saya izin maaf nih baru dapet infonya mereka udah mengetok disetujui. Jadi, untuk *in journey* itu *holding* parawisata Aviata itu 7,5 T, lalu BNI 3,5 T, lalu BTN *satu sembilan* T dan 1,98 T, lalu dari HK juga ditambahin 7,5 T. Mungkin minta saran aja mau didaftarkan atau tidak?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Langsung masuk kesimpulan Pak Menteri. Langsung kesimpulan aja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, kita acu ke kesimpulan sebelumnya dulu. Kesimpulan sebelumnya kan.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Sudah masuk di cadangan investasi di ininya, di klaster cadangan investasi di Kemenkeu di APBN.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):

Sebentar. Maksudnya gimana Pak, itu sudah disetujui oleh Banggar dan Kementerian Keuangan.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Dan diminta kita melaporkan di sini.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):

Oh. Angkanya beda *nggak* dengan yang diusulkan waktu itu ke sini?

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Tidak tidak tidak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jadi itu Rp7,5 triliun, disetujui Rp3,5 triliun.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Lebih kecil. Yang dulu kan pernah diusulkan di Komisi VI, sekarang lebih kecil.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):

Ya kalau mau sih bisa sekalian.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Laporkan aja hasilnya iya.

F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Kalau lebih kecil bisa Ketua, tapi kalau lebih besar ya perlu kita bahas lagi gitu.

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):

Ya kalau lebih kecil okelah.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Lebih kecil ini jauh ini turunnya.

KETUA RAPAT:

Hutama Karya *tujuh setengah*, kemudian BNI Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Tiga setengah.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Aviata *tujuh setengah*, itu Penas dulu namanya. Lalu BNI *tiga setengah*, BTN *satu sembilan delapan*.

KETUA RAPAT:

BTN *satu sembilan delapan*, Utama karya *tujuh setengah*?

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

tujuh setengah.

KETUA RAPAT:

Jadi ada 3.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

BNI *tiga setengah*.

KETUA RAPAT:

Menyetujui usulan PMN, tambahan PMN Tahun Anggaran 2022 dengan rincian:

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Hutama Karya *tujuh setengah*.

KETUA RAPAT:

Peruntukkannya kembali yang awal ya?

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Sama. BNI *tiga setengah*.

KETUA RAPAT:

BNI.

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Tiga setengah.

KETUA RAPAT:

Tiga setengah?

MENTERI BUMN (ERICK THOHIR):

Iya. BTN 1,98.
Tujuh setengah.

KETUA RAPAT:

Hutama Karya (Persero).
Aviasi Pariwisata.

Perlu kami sampaikan dalam rapat hari ini bahwa mengenai hal yang terkait keputusan rapat hari ini Komisi VI menyetujui PMN Tahun Anggaran 2022 untuk PT Utama Karya, untuk Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara Indonesia, serta PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang mana dalam pendalaman untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia telah kita lakukan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI pada tanggal Kamis, 2 September 2021 yang waktu itu memang kita menyampaikan keputusan-keputusan rapat yang menerima penjelasan dari PT Aviasi. Yang kita tindaklanjuti tentunya hari ini keputusan rapat Komisi VI untuk menyetujui Penerimaan Modal Negara PT Aviasi Indonesia sebesar Rp7.500.000.000.000,- yang catatannya adalah ini sebagai *holding* yang

tentunya sudah harus diturunkan Keppresnya Pak Menteri ya kita hanya bisa menyetujui. Sudah, sudah.

Kemudian mengenai hal yang terkait dengan PMN BNI, kita sudah adakan rapat pada tanggal Kamis 9 September dan PT Bank Tabungan Negara, dalam Rapat RDP dengan PT Bank Tabungan Negara dan dengan Bank BNI pada tanggal Kamis 9 September, yang mana hari ini kita menyetujui usulan tambahan PMN untuk Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Untuk hal yang terkait dengan Waskita, Hutama karya kita adakan pendalaman rapat mengenai PMN ini pada hari Rabu, 1 September 2021 yang kita adakan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan PT Hutama Karya yang waktu itu kita juga sudah menerima penjelasan penggunaan dari PT Hutama Karya untuk usulan Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2022. Demikian hal yang bisa kita sampaikan.

Untuk mempertegas bahwa persetujuan keempat ini sudah kita bahas dan kita alami di dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI dan mitra kerja penerima PMN. Untuk itu Komisi VI dalam kesimpulan ke-empat ini:

4. Komisi VI DPRRI menyetujui usulan tambahan PMN Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Hutama Karya sebesar Rp7.500.000.000.000,-.
 - b. PT Bank Negara Indonesia sebesar Rp3.500.000.000.000,-.
 - c. PT Bank Tabungan Negara Tbk sebesar Rp1.980.000.000.000,-.
 - d. PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000,-

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Pimpinan.

Ini usulan tambahan PMN dalam apa cadangan investasi ya Pak Menteri ya? Iya, maksudnya supaya dibikin dalam cadangan investasi.

..... :

Iya ini masuknya di cadangan Pak.

KETUA RAPAT:

Saya kira *nggak* perlu ditulis itu.

..... :

Itu memang masuknya di cadangan investasi itu.

F-PDIP (dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM):

Nggak perlu ditulis Pimpinan karena kan ini sudah pasti dapat nih, bukan cadangan lagi.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Nggak, memang dia klasternya di situ kan? Masuknya nomenklaturnya di situ.

KETUA RAPAT:

Nomenklatur di sananya?

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Loh *nggak* gimana sekarang, bagus disebut atau tidak Pak Menteri? Sebut aja supaya *clear*.

KETUA RAPAT:

Sebagai cadangan investasi.

F-P.NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Iya. Iya, mending sebutlah.

KETUA RAPAT:

Dalam cadangan investasi itu Mas. Saya putuskan ada tambahan.

Komisi VI DPRRI menyetujui usulan tambahan PMN dalam cadangan pembiayaan investasi Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut yang sudah saya sampaikan dalam forum rapat ini. Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri BUMN dan Menteri Investasi/Kepala BKPM beserta jajarannya, tentunya kepada Pak Wamen I dan Pak Wamen II Kementerian BUMN. Dan kepada kawan-kawan Anggota Komisi VI kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan rapat sampai pada siang hari ini.

Maka dengan kesimpulan rapat yang sudah kami kita putuskan kita akan segera mengakhiri rapat. Apakah masih ada *closing statement* Pak Menteri? Saya kira cukup.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.51 WIB)

JAKARTA, 22 SEPTEMBER 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP.197104071992032001